



**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KOTA SURAKARTA**

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

## TAHUN 2022



Jl. Yap Tjwan Bing (Jagalan) nomor 26  
Kelurahan Jagalan Kec. Jebres 57162



(0271) 656816



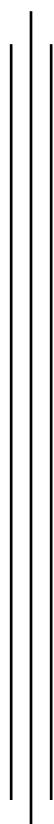
[dispangtan.surakarta.go.id](http://dispangtan.surakarta.go.id)



[dispangtan@surakarta.go.id](mailto:dispangtan@surakarta.go.id)



**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KOTA SURAKARTA**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
LKjIP  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR



Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Surakarta Tahun 2022. LKjIP ini merupakan bentuk komitmen Dispangtan Kota Surakarta dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja Lembaga Pemerintahan selama satu tahun anggaran. Kinerja Dispangtan Kota Surakarta telah diukur, dievaluasi, dianalisa dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Dispangtan Kota Surakarta.

Penyusunan LKjIP tahun 2022 ini menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di masing-masing Perangkat Daerah (PD) serta keberhasilan capaian sasaran saat ini, untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good government*, yaitu dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan.

Demikian LKjIP tahun 2022 ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja Dispangtan Kota Surakarta

Surakarta, 31 Desember 2022

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
DAN PERTANIAN  
KOTA SURAKARTA**

**Ir. EKO NOGROHO ISBANDIJARSO, M.Si**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19680223 199208 1 002

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
BAB I .....	7
PENDAHULUAN.....	7
A. Gambaran Umum .....	7
1. Gambaran Umum Kota Surakarta .....	7
1.1. Geografis.....	7
1.1. Pemerintahan .....	8
1.1. Sosial Budaya .....	8
1.1. Ekonomi .....	9
2. Gambaran Umum Pertanian Kota Surakarta .....	9
3. Gambaran Umum Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian .....	14
B. Fungsi Strategis Perangkat Daerah.....	17
1. Tujuan Perangkat Daerah.....	17
2. Sasaran Perangkat Daerah .....	17
3. Tugas pokok.....	17
4. Fungsi.....	17
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta mempunyai 3 (tiga) Unit Pelayanan Teknis (UPT) meliputi :.....	19
C. Permasalahan utama .....	19
BAB II .....	20
PERENCANAAN KINERJA .....	20
A. Indikator Kinerja.....	20
B. Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas ketahanan pangan dan pertanian .....	21
C. Perjanjian Kinerja Perubahan 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta .....	21
BAB III.....	24
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022.....	24
A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah .....	24
1. Realisasi Kinerja.....	24
2. Pengukuran Capaian .....	26
B. Penjabaran Per Sasaran .....	27
1. SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya produktifitas keunggulan kompetitif sektor Riil.....	27
1.1. Analisa Capaian Skor PPH Ketersediaan.....	29
1.2. Analisa Capaian Skor PPH Konsumsi .....	31
1.3. Perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2022 dengan Realisasi indikator kinerja Provinsi Jawa Tengah dan Nasional .....	32
1.4. Analisa Capaian PPH Ketersediaan dan PPH Konsumsi Kota Surakarta, dibandingkan dengan capaian Jawa Tengah dan Nasional ..	32
2. SASARAN 1 : Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman .....	33
2.1. Analisa capaian Realisasi persentase AKE dan AKP .....	33
2.1. Analisis Capaian Persentase PSAT aman .....	34
2.1. Analisa Program .....	34
2.1. Dokumentasi .....	36

3.	SASARAN 2 : Meningkatnya Produksi Pertanian dan Peternakan.....	40
3.1.	Analisa Capaian .....	40
3.1.	Analisa Program .....	41
3.1.	Dokumentasi .....	42
4.	SASARAN 3. Meningkatnya Kesehatan hewan/Kesehatan masyarakat veteriner dan Produk pangan asal hewan layak konsumsi..	44
4.1.	Analisa Capaian Kinerja dan Program .....	44
4.1.	Analisa capaian Kinerja dan Program .....	45
4.1.	Dokumentasi .....	47
5.	SASARAN 4. Meningkatnya produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan olahan ikan.....	51
5.1.	Analisa Capaian Kinerja dan Program .....	51
5.2.	Analisa efisiensi penggunaan SUMBER DAYA.....	53
5.3.	Dokumentasi .....	54
6.	SASARAN 5. Meningkatnya kualitas dan keefektifan perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien .....	57
6.1.	Analisa Capaian Kinerja .....	57
a.	Realisasi 2022 dibandingkan dengan realisasi 2021.....	57
b.	Realisasi tahun 2022 dibanding target tahun 2026 .....	58
C.	REALISASI ANGGARAN TOTAL .....	59
BAB IV	.....	68
PENUTUP	.....	68
A.	Kesimpulan.....	68
B.	Strategi Peningkatan Kinerja ke depan .....	69

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani sebagai pelaku <i>Urban Farming</i> .....	12
Tabel 1.2	Daftar Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta berdasarkan Tingkat Pendidikan dan jenis kelamin tahun 2022.....	16
Tabel 1.3	Rincian Aparatur Sipil Negara (ASN) Dispangtan Kota Surakarta berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2022.....	16
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026 .....	20
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Sasaran OPD tahun 2021-2026 .....	20
Tabel 2.3	Rencana Kerja Dinas Ketahanan dan pertanian Kota Surakarta Tahun 2022 ..	21
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta Tahun 2022.....	22
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .....	24
Tabel 3.2	Realisasi Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta Tahun 2018-2022 .....	25
Tabel 3.3	Pengukuran Capaian Kinerja Utama tahun 2022 .....	26
Tabel 3.4	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran tahun 2022 .....	26
Tabel 3.5	Realisasi IKU 1 2018-2022.....	27
Tabel 3.6	Capaian IKU 1 tahun 2022 .....	28
Tabel 3.7	Skor PPH Ketersediaan Kota Surakarta Tahun 2022.....	28
Table 3.8	Realisasi IKU 2 2018-2022.....	29
Tabel 3.9	Capaian IKU 2 tahun 2022 .....	30
Tabel 3.10	Skor PPH Konsumsi Penduduk Berdasarkan Data Susenas Kota Surakarta ...	30
Tabel 3.11	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan Realisasi Jateng dan Nasional .....	32
Tabel 3.12	Capaian Kinerja Sasaran 1.1 dan 2.....	33
Table 3.13	Capaian Kinerja sasaran 1.3 .....	34
Tabel 3.14	Rekap hasil uji cepat dan pengambilan sampel PSAT .....	34
Tabel 3.15	Capaian Kinerja Sasaran 2.....	40
Tabel 3.16	Capaian Kinerja Sasaran 3.1.....	44
Tabel 3.17	Capaian Kinerja Sasaran 3.2.....	45
Tabel 3.18	Capaian Kinerja Sasaran 4.....	51
Tabel 3.19	Capaian Kinerja Sasaran 5.....	57
Tabel 3.20	Realisasi anggaran 2022.....	59
Tabel 3.21	Realisasi anggaran (serapan) di bawah 80% .....	66
Tabel 4.1	Kinerja tahun 2022 .....	68

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Pemerintah Kota Surakarta .....	7
Gambar 1.2	Peta Lahan Pertanian.....	11
Gambar 1.3.	SOTK Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta.....	15
Grafik 3.1	Skor PPH Ketersediaan .....	27
Grafik 3.2	Skor PPH Konsumsi.....	30

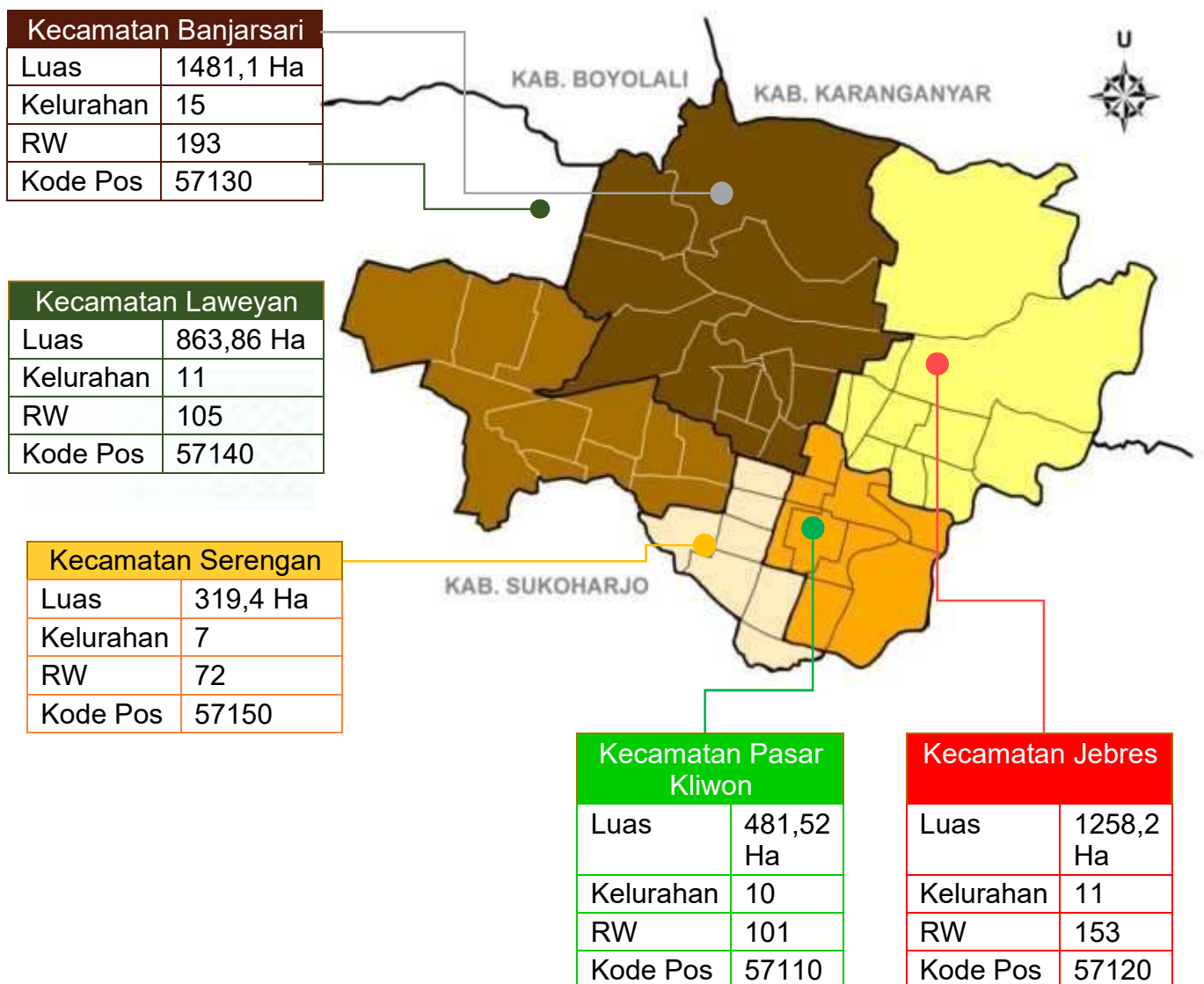
# BAB I PENDAHULUAN

## A. Gambaran Umum

### 1. Gambaran Umum Kota Surakarta

#### 1.1. Geografis

Kota Surakarta berada diantara 110° 45'15" - 110° 45'35" Bujur Timur dan 7° 35' - 7° 56' Lintang Selatan, Luas Kota Surakarta mencapai 46,72 km<sup>2</sup> (4.672 Ha) atau 0,14% luas Propinsi Jawa Tengah. Kota Surakarta berada sekitar 100 km tenggara Semarang (ibu kota Propinsi Jawa Tengah), dan merupakan dataran rendah dengan ketinggian ± 92 m diatas permukaan laut, serta dikelilingi oleh Gunung Merbabu dan Merapi (ketinggian 3115 meter) dibagian barat, Gunung Lawu (tinggi 2806 meter) dibagian timur dan selatan pegunungan sewu.



Gambar 1.1 Peta Wilayah Pemerintah Kota Surakarta



Batas Wilayah Kota Surakarta sebelah utara yaitu Kabupaten Boyolali, sebelah Timur adalah Kabupaten Karanganyar, dan sebelah Selatan serta Barat adalah Kabupaten Sukoharjo.

### 1.1. Pemerintahan

Wilayah Surakarta terbagi menjadi 5 Kecamatan yaitu (1) Kecamatan Banjarsari; (2) Kecamatan Pasar Kliwon; (3) Kecamatan Jebres; (4) Kecamatan Laweyan; dan (5) Kecamatan Serengan, dan terdiri dari 54 kelurahan, 624 RW dan 2.784 RT. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Surakarta sebanyak 35 OPD ditambah dengan 2 BMUD (PDAM dan Bank Solo).

Visi dan Misi Pembangunan Kota Surakarta tahun 2021-2026 adalah "MEWUJUDKAN SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA YANG MODERN, TANGGUH, GESIT, KREATIF DAN SEJAHTERA" dan Misi Kota Surakarta (7) adalah sbb:

- 1) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan
- 2) **Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan**
- 3) Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan
- 4) Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga
- 5) Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan
- 6) Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif; dan
- 7) Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati.

### 1.1. Sosial Budaya

Jumlah penduduk kota Surakarta berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2021 berjumlah 572.560 jiwa, dengan jumlah laki – laki 281.956 jiwa dan perempuan 290.604 jiwa. Kecamatan yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak adalah kecamatan Banjarsari yaitu 182.145 jiwa, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah kecamatan Serengan yaitu 54.513 jiwa.

Kota Surakarta memiliki semboyan "Berseri" singkatan dari : "Bersih, Sehat, Rapi, dan Indah" sebagai slogan pemeliharaan keindahan kota.

Salah satu daya tarik kota Solo adalah adanya lintasan jalur kereta api yang melintasi jalan utama kota Solo (Jl. Slamet Riyadi), jalur kereta ini dibangun sejak tahun 1922 ini masih aktif digunakan sampai dengan sekarang yang menghubungkan antara Stasiun Kota yang terletak di daerah Sangkrah dengan Stasiun Purwosari yang terletak di daerah Purwosari.

“Solo The Spirit Of Java” sebagai Bentuk Branding Kota Surakarta (Solo), yang mengandung makna bahwa Solo merupakan jiwanya Jawa adalah upaya branding promosi pariwisata dan event budaya, untuk pemasaran pariwisata dengan budaya Solo sebagai daya tarik. slogan tersebut lahir sebagai bagian upaya memperkuat otonomi daerah Soloraya dengan Solo sebagai pusat kebudayaan Jawa. adanya Keraton Kasunanan dan Keraton Mangkunegaran “Solo The Spirit Of Java” menjadi LOGO Kota Solo, pemilihan warna penuh makna pada Logo tersebut yakni “Ungu dan Hijau” adalah warna ungu mewakili keagungan Solo dan warna hijau warna daun mewakili pertumbuhan yang berkelanjutan sustainability.

### **1.1. Ekonomi**

Dilihat dari aspek lalu lintas perhubungan di Pulau Jawa, posisi Kota Surakarta tersebut berada pada jalur strategis yaitu pertemuan atau simpul yang menghubungkan Semarang dengan Yogyakarta (JOGLOSEMAR), dan jalur Surabaya dengan Yogyakarta. Dengan posisi yang strategis ini maka tidak heran kota Surakarta menjadi pusat bisnis (hasil pertanian /bahan pangan) yang penting bagi daerah kabupaten di sekitarnya (SUBOSUKAWONOSRATEN)

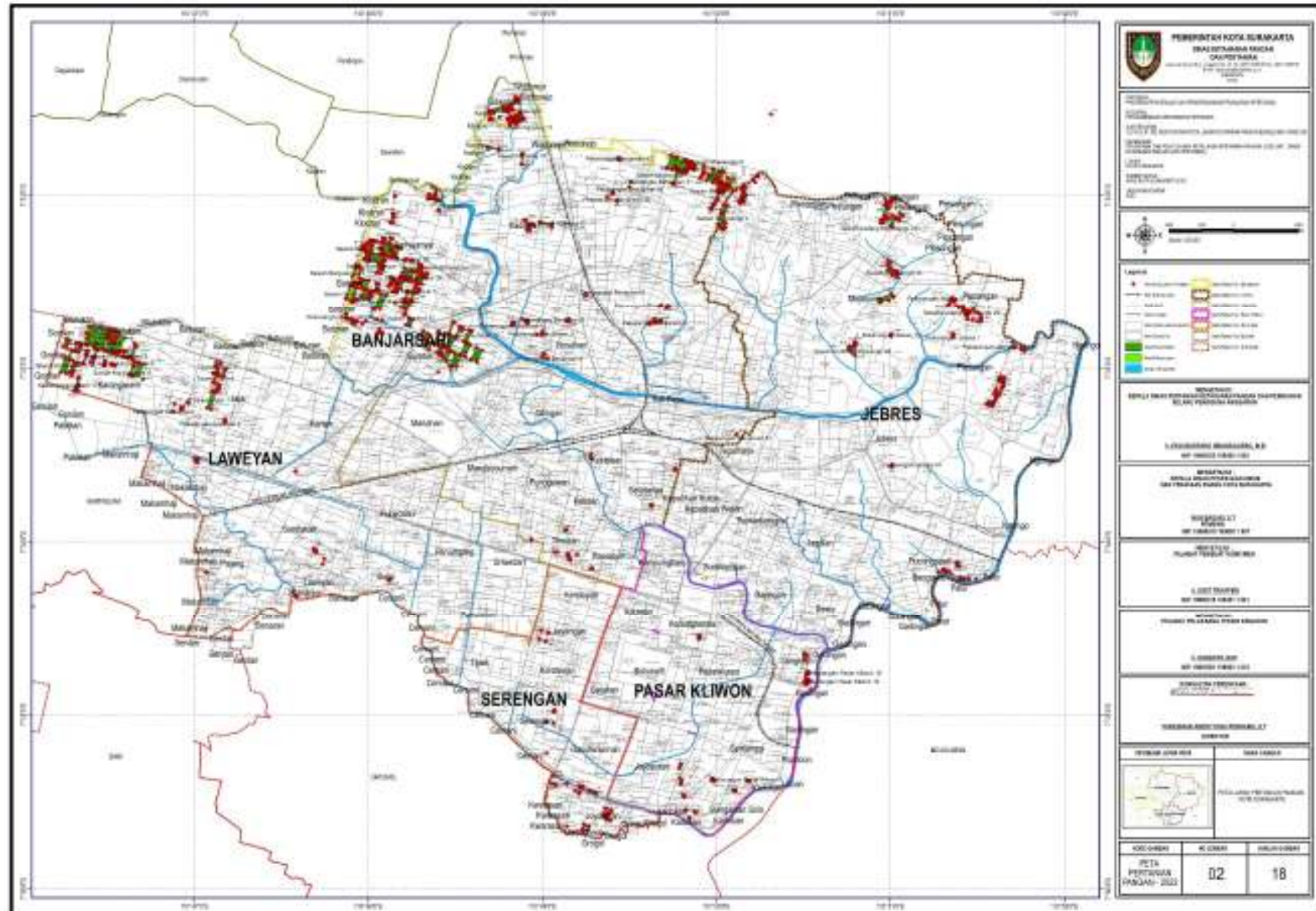
## **2. Gambaran Umum Pertanian Kota Surakarta**

Dengan adanya Perda No 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surakarta tahun 2021 sd 2041, dalam perda tersebut tidak tertuang adanya lahan yang diperuntukkan pertanian tanaman pangan (sawah), sehingga kebijakan pembangunan pertanian di wilayah kota Surakarta difokuskan pada pengembangan pekarangan dan lahan tidur guna ketahanan pangan, untuk lahan sawah yang masih tersisa 42,5 Ha tersebar di Kecamatan Laweyan dan Kecamatan Banjarsari sampai dengan tahun 2041 tetap akan difasilitasi sampai sejauh mana pemilik (kelompok tani padi) nya tetap memanfaatkannya.

Kondisi atau gambaran terkait Pertanian Perkotaan (Urban Farming) yang ada di Kota Surakarta dapat dilihat pada Peta lahan pertanian, berikut Peta eksisting lahan pertanian yang ada di kota Surakarta baik yang dimanfaatkan sebagai lahan sawah dan lahan non sawah yang diusahakan oleh para Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani dengan tanaman hortikultural, dapat dilihat pada Gambar 1.2 di bawah ini



Gambar 1.2 Peta Lahan Pertanian



Tabel 1.1 Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani sebagai pelaku *Urban Farming*

No.	Kecamatan	Kelurahan	Nama Kelompok
1	Banjarsari	Banyuanyar	MORO SENENG
2	Banjarsari	Banyuanyar	KARYA USAHA
3	Banjarsari	Banyuanyar	Pemuda Tani Tangguh
4	Banjarsari	Banyuanyar	Tri Manunggal Tani
5	Banjarsari	Sumber	SUMBER REJEKI
6	Banjarsari	Sumber	SUMBER LESTARI
7	Banjarsari	Kestalan	NGUPOYO BOGA
8	Banjarsari	Nusukan	Cahaya Asri
9	Banjarsari	Nusukan	Subur Makmur
10	Banjarsari	Nusukan	Sari Mekar
11	Banjarsari	Nusukan	Bina Lansia Mandiri
12	Banjarsari	Nusukan	Organa Gardenia
13	Banjarsari	Nusukan	Surya Alam
14	Banjarsari	Nusukan	Makmur Sejahtera
15	Banjarsari	Nusukan	Sekar Flamboyan
16	Banjarsari	Nusukan	Tunas Mekar
17	Banjarsari	Nusukan	Pesona Tani Nusukan
18	Banjarsari	Banjarsari	Ngudi Kawruh
19	Banjarsari	Banjarsari	Tani Makmur II
20	Banjarsari	Banjarsari	Srikandi Clolo
21	Banjarsari	Banjarsari	Surya Mentari
22	Banjarsari	Banjarsari	Amara Gardenia
23	Banjarsari	Banjarsari	Tirta Ulam Sari Indah Sari
24	Banjarsari	Kadipiro	Tani Makmur I
25	Banjarsari	Kadipiro	Ngipang Baru Mekar
26	Banjarsari	Kadipiro	Abdi Dalem Klebengan
27	Banjarsari	Kadipiro	Subur Mamur
28	Banjarsari	Gilingan	Mandiri Asri
29	Banjarsari	Timuran	Dewi Asri
30	Banjarsari	Timuran	Nderek Gesang
31	Banjarsari	Timuran	Cupu Manik Astagina
32	Banjarsari	Timuran	Loh Jinawi
33	Banjarsari	Timuran	Srikandi
34	Banjarsari	Timuran	Barokah
35	Banjarsari	Joglo	Ngudi Makmur
36	Banjarsari	Joglo	Asri
37	Banjarsari	Manahan	Lindu Aji
38	Banjarsari	Keprabon	Pesona Asri
39	Laweyan	Karangasem	Bulak Indah
40	Laweyan	Karangasem	Putri Mandiri
41	Laweyan	Kerten	Srikandi
42	Laweyan	Bumi	Catur Tunggal Abadi
43	Laweyan	Pajang	Kankud Solid
44	Laweyan	Pajang	Erlima Jaya

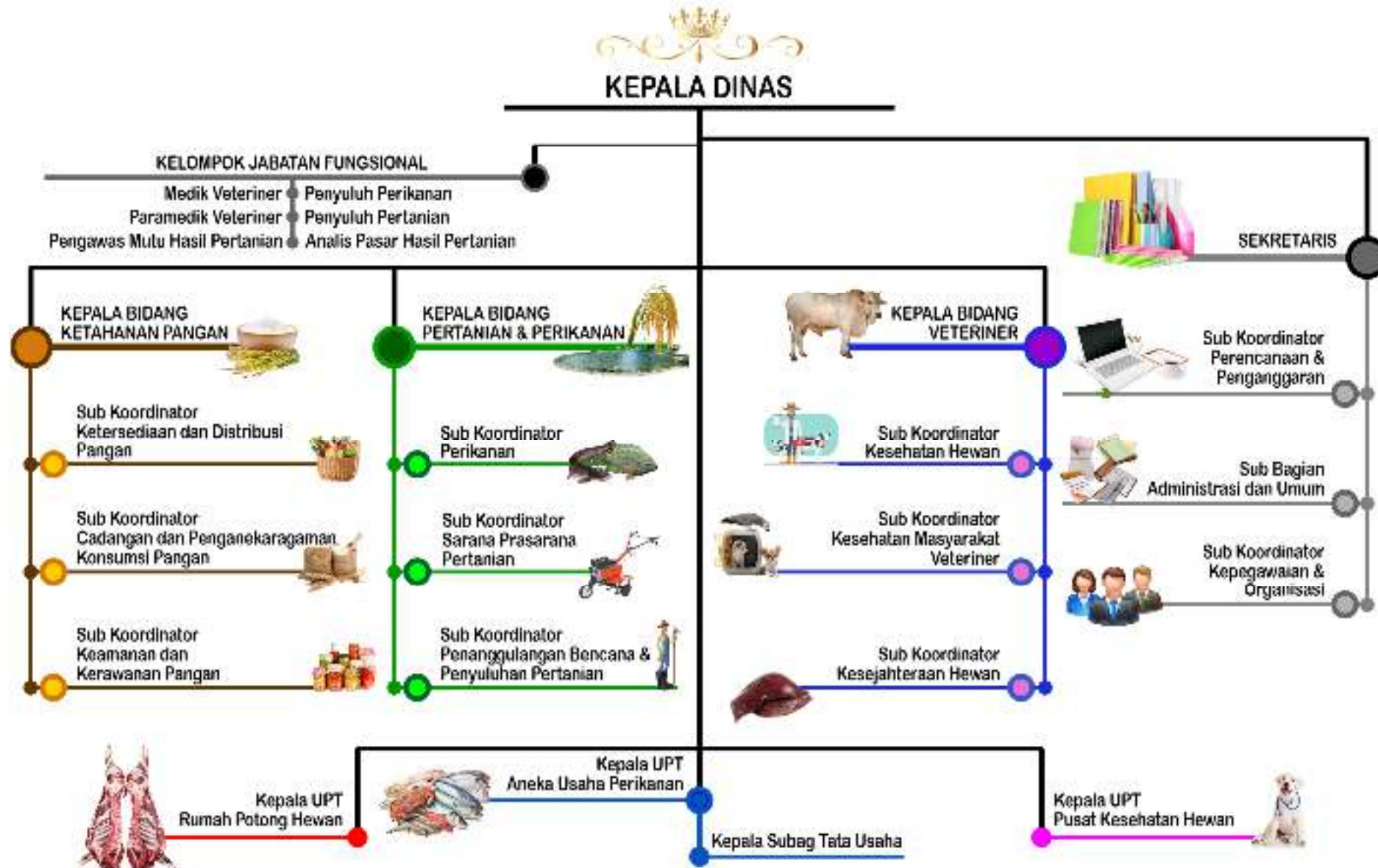
No.	Kecamatan	Kelurahan	Nama Kelompok
45	Laweyan	Sondakan	Berseirama
46	Laweyan	Jajar	Jajar
47	Laweyan	Jajar	Jajar Berseri
48	Laweyan	Laweyan	Tiga Negeri
49	Laweyan	Kerten	Urban Latar Rejeki
50	Laweyan	Kerten	Kaswari
51	Laweyan	Sondakan	Mawar Merah
52	Laweyan	Karangasem	Putri Berkembang
53	Laweyan	Panularan	Sumber Rejeki
54	Pasar Kliwon	Joyosuran	Nusa Indah
55	Pasar Kliwon	Joyosuran	Tandur Tukul
56	Pasar Kliwon	Semanggi	Dados Rukun
57	Pasar Kliwon	Pasar Kliwon	Griya Asri
58	Pasar Kliwon	Pasar Kliwon	Ps. Kliwon Go Green
59	Pasar Kliwon	Sangkrah	Subur Makmur asri
60	Pasar Kliwon	Kampung Baru	Sumber Makmur
61	Pasar Kliwon	Sangkrah	Makmur
62	Pasar Kliwon	Sangkrah	Dasa Makmur
63	Pasar Kliwon	Mojo	Mojo Mapan
64	Pasar Kliwon	Mojo	Karya Maju
65	Pasar Kliwon	Kedung Lumbu	Lumbu Makmur
66	Serengan	JOYOTAKAN	PINILIH
67	Serengan	JOYOTAKAN	KWT Pinilih
68	Serengan	JOYOTAKAN	KWT Sekar Wijaya
69	Serengan	SERENGAN	Serengan Asri
70	Serengan	SERENGAN	KWT Serengan Asri
71	Serengan	SERENGAN	KWT Serengan Go Green
72	Serengan	Danukusuman	Kusuma Mulya
73	Jebres	Pucangsawit	KWT DAHLIA
74	Jebres	Mojosongo	Guyup Makmur
75	Jebres	Sewu	SIBAT SEWU
76	Jebres	Pucangsawit	TANI RAPI
77	Jebres	Jebres	SEKAR TAJI
78	Jebres	Jebres	Gulon Barseri
79	Jebres	Mojosongo	SIDO MULYO
80	Jebres	Mojosongo	MERTOJOYO
81	Jebres	Mojosongo	KSM Kahuripan Sejahtera
82	Jebres	Mojosongo	KWT LESTARI
83	Jebres	Mojosongo	SEJAHTERA
84	Jebres	Mojosongo	KEMBANGKOE
85	Jebres	Mojosongo	TRENGGINAS
86	Jebres	Mojosongo	KWT Kahuripan Sejahtera
87	Jebres	Kepatihan Kulon	KEEMASAN HIJAU
88	Jebres	Mojosongo	LESTARI
89	Jebres	Mojosongo	Ngudi Asri

No.	Kecamatan	Kelurahan	Nama Kelompok
90	Jebres	Mojosongo	MOJOSONGO I
91	Jebres	Mojosongo	Alumni 149
92	Jebres	Mojosongo	Bakti Mulyo
93	Jebres	Mojosongo	Mertojoyo
94	Jebres	Mojosongo	Bakti Mulyo
95	Jebres	Mojosongo	KWT Lestari
96	Jebres	Mojosongo	Keltan Lestari
97	Jebres	Mojosongo	Angremboko
98	Jebres	Mojosongo	FKK Mojosongo
99	Jebres	Mojosongo	Afinitas LPMK
100	Pasar Kliwon	Mojo	Ngudi Lestari
101	Jebres	Mojosongo	Merto Makmur
102	Banjarsari	Setabelan	Green Handayani
103	Banjarsari	Sumber	Sumber Martani
104	Banjarsari	Sumber	Sumber Makmur

### 3. Gambaran Umum Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai 3 (tiga) urusan, yaitu 1 (satu) urusan wajib bukan pelayanan dasar yaitu Urusan Pangan, dan 2 (dua) urusan pilihan yaitu urusan Pertanian dan urusan Kelautan Perikanan. Pada urusan Pertanian di dalamnya termasuk Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Di RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026 Tusi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta masuk ke dalam Misi Kota ke 2, yaitu “Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan” masuk pada Tujuan Kota ke 5 yaitu “Pembangunan ekonomi cerdas berkeadilan berkelanjutan”, dan masuk pada Sasaran ke 2 Kota yaitu Meningkatkan Produktivitas Keunggulan Kompetitif Sector Riil, sekaligus sasaran ke 2 tersebut menjadi TUJUAN Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta masuk di strategi ke 5 Kota yaitu “Meningkatkan Ketahanan Pangan” Berdasar Perda SOTK Kota Surakarta no 8 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 40 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta terdiri dari Kesekretariatan (3 bagian), 3 Bidang dan 3 UPT, Bagan SOTK Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dapat dilihat pada gambar 1.3 berikut

Gambar 1.3. SOTK Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta





Adapun Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta, dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1.2 Daftar Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta berdasarkan Tingkat Pendidikan dan jenis kelamin tahun 2022

No	Status Pegawai	Jml SDM	Tingkat Pendidikan (orang)													
			S3		S2		S1		D3		SLTA		SLTP		SD	
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	ASN-PNS	55			3	4	11	19	2	6	6		1		3	
2	ASN-PPPK	10					1	4	3	1		1				
3	TKPK (Kontrak)	33					2	2	4	4	11		5		5	
4	Pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan	3					2		1							
<b>Total</b>		<b>101</b>			<b>3</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>27</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>6</b>		<b>8</b>	

Sumber: Data Dispangtan Kota Surakarta

Tabel 1.3 Rincian Aparatur Sipil Negara (ASN) Dispangtan Kota Surakarta berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2022

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Pasca Sarjana (S2)	10
2.	Sarjana (S1)	
	a. Dokter Hewan	10
	b. Sarjana Peternakan	3
	c. Sarjana Pertanian	15
	d. Sarjana Perikanan	4
	e. Sarjana Ekonomi	1
	g. Sarjana Hukum	1
3.	D3	4
4.	SLTA	11
5.	SLTP	3
6.	SD / MI	1
	<b>Jumlah</b>	<b>65</b>

Sumber: Data Dispangtan Kota Surakarta

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian juga berkontribusi dalam pendapatan Kota Surakarta, yang dihasilkan dari penarikan Retribusi dari Dinas dan ke-3 (tiga) UPT nya sebagai **Pendapatan Asli Daerah**

Sumber Pendapatan Asli Daerah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yaitu:

- a. Pemotongan Hewan (Sapi, Kambing, Babi, dan Unggas).
- b. Sewa Cold Storage.
- c. Pelayanan Medis (Klinik) Hewan.
- d. Pengiriman Hewan.
- e. Pemeriksaan Kesehatan Hewan.
- f. Penjualan Benih Ikan.
- g. Sewa Tempat Pasar Ikan Higienis, Depo Ikan, Outlet Ikan Balekambang, dan Kolam.

## **B. Fungsi Strategis Perangkat Daerah**

### **1. Tujuan Perangkat Daerah**

Tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah “Meningkatkan produktivitas keunggulan kompetitif Sektor Riil”

### **2. Sasaran Perangkat Daerah**

- a. Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman
- b. Meningkatnya produktivitas pertanian dan peternakan
- c. Meningkatnya kesehatan hewan dan produk pangan asal hewan yang layak konsumsi
- d. Meningkatnya produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan olahan ikan
- e. Meningkatnya kualitas dan keefektifan Perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien

### **3. Tugas pokok**

Tugas Pokok Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menurut Perwali SOTK no 40 tahun 2021 adalah Menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan, pertanian dan kelautan/perikanan, meliputi:

- a. Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas.
- b. Perumusan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan.
- c. Perumusan kebijakan di bidang Pertanian-Peternakan-Perikanan
- d. Perumusan kebijakan di bidang Veteriner.(Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner)

### **4. Fungsi**

- a. Penyusunan Rencana Strategis. Rencana program, anggaran, pengendalian evaluasi dan Pelaporan.
- b. Pembinaan kepegawaian dan tata laksana organisasi

- c. Pengelolaan administrasi penatausahaan keuangan dan kerumahtanggaan dinas.
- d. Pengelolaan cadangan dan kerawanan pangan, ketersediaan dan distribusi pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan (Pangan Segar Asal Tumbuhan - PSAT).
- e. Pengelolaan produksi tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan
- f. Perlindungan/pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dan bencana pertanian
- g. Penyusunan/penyelenggaraan penyuluhan (pertanian peternakan dan perikanan)
- h. Pembinaan Pengolahan pangan dan pemasaran hasil
- i. Penyediaan/pengawasan sarana prasarana pertanian perikanan, dan peredaran obat hewan
- j. Pemeriksaan kesehatan hewan.
- k. Pembinaan jasa pelayanan kesehatan hewan, pengusaha obat hewan dan pet shop.
- l. Penertiban/ pembinaan dan pemeriksaan Produk Asal Hewan (PAH) dan Produk Pangan Asal Hewan (PPAH) serta *hygiene* sanitasi.
- m. Pembinaan penerapan Kesejahteraan Hewan.
- n. Pemberian rekomendasi lalu lintas hewan, Produk Asal Hewan (PAH) dan Produk Pangan Asal Hewan (PPAH).
- o. Pemberian Rekomendasi atas permintaan ijin usaha pertanian, peternakan, perikanan budidaya hewan kesayangan dan jasa pelayanan kesehatan hewan.
- p. Peningkatan kualitas SDM di semua bidang.
- q. Pembinaan UPT Aneka Usaha Perikanan (AUP), UPT Rumah Potong Hewan (RPH) dan UPT Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan).
- r. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan.
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota.
- t. Pembinaan Jabatan Fungsional.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta, maka secara umum memiliki Fungsi Strategis dalam pembangunan Kota Surakarta:

- a. Pemanfaatan lahan pekarangan sebagai peningkatan produksi serta Pertanian, Peternakan, Perikanan PERKOTAAN untuk kesejahteraan rakyat.
- b. Pengembangan sumber daya Pertanian, Peternakan, Perikanan meliputi SDM, IPTEK, Ekonomi, Informasi, Kelembagaan melalui inovasi, diversifikasi, intensifikasi dan rehabilitasi.
- c. Pengelolaan Investasi Pertanian, Peternakan, Perikanan mengoptimalkan pengolahan dan pemasaran pasca panen hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan.

- d. Pengembangan system agribisnis dan pembentukan sinergi antara stakeholder yang *pro-poor, pro-growth, pro-job, dan pro-environment*.
- e. Pelayanan masyarakat di Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Pertanian dan Perikanan, Bidang Veteriner

**5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta mempunyai 3 (tiga) Unit Pelayanan Teknis (UPT) meliputi :**

- 1) UPT Pusat Kesehatan Hewan, mempunyai fungsi:
  - a. Memberikan pelayanan kesehatan hewan
  - b. Menyelenggarakan upaya penyehatan hewan, pencegahan penyakit hewan
  - c. Melaksanakan pelayanan jasa laboratorium pengujian PPAH dan jasa medik veteriner
  - d. Melaksanakan pelayanan kesehatan hewan, penitipan hewan, rawat inap dan performance hewan.
- 2) UPT Rumah Potong Hewan (RPH), mempunyai fungsi:
  - a. Melaksanakan pemotongan hewan
  - b. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan teknis terhadap ternak karkas daging dan ikutannya yang berada di RPH termasuk higienitasnya
  - c. Melaksanakan pengelolaan sanitasi RPH.
- 3) UPT Aneka Usaha Perikanan (AUP) mempunyai fungsi :
  - a. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Balai benih ikan (BBI) dan pasar ikan
  - b. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan produksi serta pemasaran benih ikan.
  - c. Melaksanakan kegiatan promosi gemarikan

**C. Permasalahan utama**

- 1. Ketergantungan bahan pangan pada daerah sekitar
- 2. Adanya Pola konsumsi pangan masyarakat belum beragam bergizi berimbang dan aman
- 3. Masih beredarnya produk pangan pangan asal hewan PPAH pangan segar ikan (PSI) dan pangan segaral tumbuhan PSAT
- 4. Adanya penyakit hewan yang menular antar hewan dan ke manusia (zoonosis)
- 5. Belum optimalnya produktivitas perikanan kualitas produk olahan, hasil perikanan pemasaran hasil perikanan.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Indikator Kinerja

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026

Misi/ Tujuan/ Sasaran	No	Strategi	No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2022
Misi ke-2 Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan	1.	Meningkatkan Ketahanan Pangan	1.	Skor PPH ketersediaan (angka)	96,8
			2	Skor PPH Konsumsi (angka)	90
Tujuan ke-5 Pembangunan ekonomi cerdas berkeadilan berkelanjutan					
Sasaran Kota ke-2 Tujuan OPD Meningkatkan produktivitas keunggulan kompetitif sektor riil					

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Sasaran OPD tahun 2021-2026

No	SASARAN KOTA/ TUJUAN OPD	No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2022
1	Meningkatkan produktivitas keunggulan kompetitif sector riil	1	Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman	1	Prosentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	97,8%
					Prosentase Angka Kecukupan Protein (AKP)	100%
					Prosentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) aman	76%
		2	Meningkatnya produktivitas pertanian dan peternakan	2	Produksi Pertanian (ton)	4866 ton
		3	Meningkatnya Kesehatan hewan/kesehatan masyarakat veteriner dan Produk pangan asal hewan layak konsumsi	3	Angka status Kesehatan hewan	72%
					Rasio PPAH layak konsumsi	90%
		4	Meningkatnya produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan olahan ikan	4.	Produksi Ikan (ton)	246 ton
		5	Meningkatnya kualitas dan keefektifan perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien		Nilai PMPRB	33.7

## B. Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas ketahanan pangan dan pertanian

Tabel 2.3 Rencana Kerja Dinas Ketahanan dan pertanian Kota Surakarta Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan produktivitas keunggulan kompetitif sektor riil (TUJUAN OPD)	Skor PPH Ketersediaan (IKU)	96,8
		Skor PPH Konsumsi (IKU)	90
2	Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman	Prosentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	97,8 %
		Prosentase Kecukupan Protein (AKP)	100%
		Pangan Segar asal Tumbuhan (PSAT) aman	76%
3.	Meningkatnya produktivitas pertanian dan peternakan	Produksi Pertanian	4866 ton
4.	Meningkatnya Kesehatan hewan/kesehatan masyarakat veteriner dan Produk pangan asal hewan layak konsumsi	Angka Status Kesehatan hewan	72
		Rasio PPAH layak konsumsi	90%
5.	Meningkatnya produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan olahan ikan	Produksi ikan	246 ton
6	Meningkatnya kualitas dan keefektifan perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien	Nilai PMPRB	33,7

## C. Perjanjian Kinerja Perubahan 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis dan Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<b>Meningkatnya produktivitas dan keunggulan kompetitif sektor riil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi</li> <li>– Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>90</b></p> <p style="text-align: center;"><b>96,8</b></p>
1.1	Meningkatnya Ketersediaan dan Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Prosentase Angka Kecukupan Energi (AKE)</li> <li>– Prosentase Angka Kecukupan Protein (AKP)</li> <li>– Prosentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Aman</li> </ul>	<p style="text-align: center;">97,8 %</p> <p style="text-align: center;">100 %</p> <p style="text-align: center;">76 %</p>
1.2	Meningkatnya produktivitas pertanian dan peternakan	Produksi Pertanian	4.866 ton
1.3	Meningkatnya status kesehatan hewan dan meningkatnya produk pangan asal hewan yang layak konsumsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Angka Status Kesehatan Hewan</li> <li>– Rasio PPAH layak konsumsi</li> </ul>	<p style="text-align: center;">72</p> <p style="text-align: center;">90 %</p>
1.4	Meningkatnya produksi tangkap, budidaya dan olahan ikan	Produksi ikan	246 ton
1.5	Meningkatnya kualitas dan keefektifitas perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien	Nilai PMPRB	33,7

No.	Program	Anggara (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.219.112.900,00	APBD
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	613.098.000,00	APBD
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	. 149.388.400,00	APBD
4	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	539.002.755,00	APBD
5	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	763.364.500,00	APBD
6	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	38.000.000,00	APBD
7	Program Penyuluhan Pertanian	224.801.800,00	APBD
8	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	. 583.147.000,00	APBD
9	Program Perizinan Usaha Pertanian	14.538.000,00	APBD
10	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	50.000.000,00	APBD
11	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	545.583.244,00	APBD
12	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	437.620.225,00	APBD
13	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.002.706.539,10	APBD
<b>JUMLAH</b>		<b>18.180.363.363,10</b>	



**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2022**

**A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah**

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	PREDIKAT	NILAI	MEAN
1	Sangat Berhasil	$n > 85$	92.5
2	Berhasil	$70 < n \leq 85$	77.5
3	Cukup Berhasil	$55 < n \leq 70$	62.5
4	Tidak Berhasil	$N < 55$	27.5

**1. Realisasi Kinerja**

Pada tahun 2022, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta Tahun 2022 dan Rencana Strategis Dinas ketahanan pangan dan pertanian Kota Surakarta, terdapat 2 Indikator Kinerja Utama (IKU), dan 8 Indikator Kinerja Sasaran dari 1 Sasaran Strategis dan 5 Sasaran OPD yang harus diwujudkan pada tahun ini.

Realisasi kinerja dan target kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta tahun 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta Tahun 2018-2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya produktivitas keunggulan kompetitif sektor Riil	Skor PPH Ketersediaan	Angka	84	93,90	85	96,8	86	90,9	92	92,22	96,8	97,87
		Skor PPH Konsumsi	Angka	84	94,2	84	94,8	85	90,8	86	92,8	90	88,7

## 2. Pengukuran Capaian

Pengukuran capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta Tahun 2022 dibagi menjadi 2 yaitu untuk Capaian Kinerja utama di Tabel 3.3 dan untuk Capaian Kinerja Sasaran di Tabel 3.4

Tabel 3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Utama tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2026 (Akhir RPJMD)		Predikat
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)	
<b>Sasaran Strategis Meningkatkan produktivitas keunggulan kompetitif sector riil</b>											
1	Skor PPH Ketersediaan	angka	92,2	93,99	101,94	96,8	97,87	101,1	97	97	<b>Sangat berhasil</b>
2	Skor PPH Konsumsi	angka	86	92,8	107,9	90	88,7	98,5	90,8	97,6	<b>Sangat berhasil</b>
<b>TOTAL RATA-RATA</b>					<b>209,84</b>			<b>199,1</b>		<b>194</b>	
<b>PREDIKAT</b>					<b>Sangat berhasil</b>			<b>Sangat berhasil</b>		<b>Sangat berhasil</b>	

Tabel 3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2026 (Akhir RPJMD)		Predikat
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)	
<b>Sasaran 1, Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman</b>											
1	Prosentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	%	96,70	98,3	101,6	97,8	90,4	92,4	100	90,4	<b>Sangat berhasil</b>
2	Prosentase Angka Kecukupan Protein (AKP)	%	140,60	111,3	79	100	99,60	99,6	100	99,6	<b>Sangat berhasil</b>
3	Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	%	89,17	99,25	111,3	76	95,63	125,8	80	119,5	<b>Sangat berhasil</b>
<b>Sasaran 2, Meningkatnya produktivitas pertanian dan peternakan</b>											
2	Produksi Pertanian	Ton	4800	5108,36	106,4	4866	5881,1	120,3	5460	107,7	<b>Sangat berhasil</b>
<b>Sasaran 3 Meningkatnya Kesehatan hewan dan Produk panga nasal hewan layak konsumsi</b>											
1	Angka Status Kesehatan Hewan	ton	70	95	135,7	72	81,82	113,6	82,5	99	<b>Sangat berhasil</b>
2	Rasio PPAH Layak Konsumsi	%	90	96,48	107,2	90	98,27	109,1	90,25	108,8	<b>Sangat berhasil</b>
<b>Sasaran 4. Meningkatnya produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan olahan ikan</b>											
4	Produksi Ikan	Ton	250,6	250,1	99	246	251,06	102	258,5	97	<b>Sangat berhasil</b>

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2026 (Akhir RPJMD)		Predikat
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)	
<b>Sasaran 5. Meningkatnya kualitas dan keefektifan perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien</b>											
1	Nilai PMPRB	angka	33,6	33,7	100,2	33,7	33,86	100,4	33,9	99	<b>Sangat berhasil</b>
	TOTAL				840,4			862,63		821	
	<b>RATA-RATA PREDIKAT</b>				<b>105,05 Sangat berhasil</b>			<b>107,8 Sangat berhasil</b>		<b>102,6 Sangat berhasil</b>	

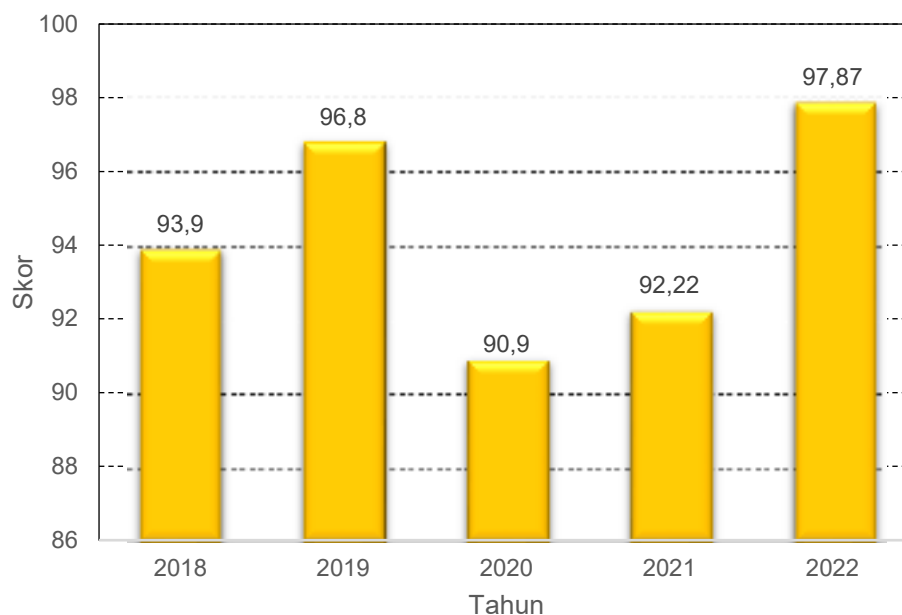
## B. Penjabaran Per Sasaran

### 1. SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya produktifitas keunggulan kompetitif sektor Riil

Tabel 3.5 Realisasi IKU 1 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018		2019		2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Skor PPH Ketersediaan	angka	84	93,90	85	96,8	86	90,9	92	92,22	96,8	97,87

Grafik 3.1 Skor PPH Ketersediaan



Tabel di atas menunjukkan bahwa skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Kota Surakarta mengalami peningkatan selama tahun 2018-2022.

Namun demikian dari 2019 ke 2020 dan 2021 mengalami penurunan, karena adanya pandemi covid -19, adanya pembatasan (PPKM) saat terjadi pandemic, berakibat pasokan dari luar wilayah Surakarta dan produksi luar/dalam daerah menurun terkait PPKM dalam proses produksinya. Penurunan skor PPH pada 2020-2021 menunjukkan bahwa terjadi penurunan mutu atau keberagaman ketersediaan pangan untuk penduduk Kota Surakarta. Kemudian pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan. Hal ini terjadi karena berangsur kondisi membaik seiring pandemic menjadi

endemi berakibat perubahan sumbangan energi setiap kelompok bahan makanan terhadap total ketersediaan energi yang tercermin dari skor PPH setiap kelompok bahan makanan mengalami peningkatan

Tabel 3.6 Capaian IKU 1 tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2026 (Akhir RPJMD)	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
1	Skor PPH Ketersediaan	Angka	92,2	93,99	101,94	96,8	97,87	101,1	97	97

Tabel 3.7 Skor PPH Ketersediaan Kota Surakarta Tahun 2022

No.	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor riil	Skor PPH	Skor Maks	Ket
1.	Padi-padian	2.029	84,6	0,5	42,28	25,00	25,0	+
2.	Umbi-umbian	61	2,5	0,5	1,27	1,27	2,5	-
3.	Pangan Hewani	389	16,2	2,0	32,42	24,00	24,0	+
4.	Minyak dan Lemak	324	13,5	0,5	6,75	5,00	5,0	+
5.	Buah/biji berminyak	5	0,2	0,5	0,10	0,10	1,0	-
6.	Kacang-kacangan	186	7,7	2,0	15,49	10,00	10,0	+
7.	Gula	218	9,1	0,5	4,55	2,50	2,5	+
8.	Sayuran dan buah	179	7,5	5,0	37,31	30,00	30,0	+
9.	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>3.392</b>	<b>141,3</b>		<b>140,18</b>	<b>97,87</b>	<b>100,0</b>	

Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa dari 9 (Sembilan) kelompok bahan pangan yaitu :

- a. Padi-padian : beras, jagung, terigu.
- b. Umbi-umbian/ makanan berpati ketela pohon ketela rambat, kentang, talas dan sagu.
- c. Pangan Hewani : daging, ikan, susu, telur.
- d. Minyak dan lemak : minyak kelapa, minyak jagung, minyak goreng/ minyak kelapa sawit dan margarin.
- e. Buah dan biji : kelapa, kemiri, kenari, mete, coklat berminyak.
- f. Kacang-kacangan : Kedele, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, kacang polong, kacang tunggak dan kacang lainnya.
- g. Gula : gula pasir dan gula merah/ mangkok
- h. Sayur dan buah

Terdapat 6 (enam) kelompok bahan pangan yang telah mencapai skor PPH maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan energi per kapita untuk kelompok bahan pangan tersebut sudah mencukupi dari batas maksimal yang sudah ditetapkan. Kelompok bahan pangan yang sudah mencapai skor PPH maksimal tersebut adalah padi-padian, minyak dan lemak, pangan hewani, gula, serta sayuran dan buah. Sedangkan kelompok bahan pangan yang belum mencapai skor maksimal PPH adalah umbi-umbian dan buah/biji berminyak.

Dengan mengetahui hasil skor PPH ketersediaan tersebut, menjadikan acuan untuk perencanaan peningkatan mutu ketersediaan pangan penduduk Kota Surakarta dengan meningkatkan ketersediaan pangan yang belum maksimal dan mempertahankan ketersediaan pangan yang sudah mencapai batas skor maksimal PPH. Perbaikan ini dapat digunakan untuk meningkatkan skor PPH ketersediaan yang menunjukkan peningkatan mutu ketersediaan pangan penduduk Kota Surakarta dari sisi ketersediaan bahan pangan yang beragam.

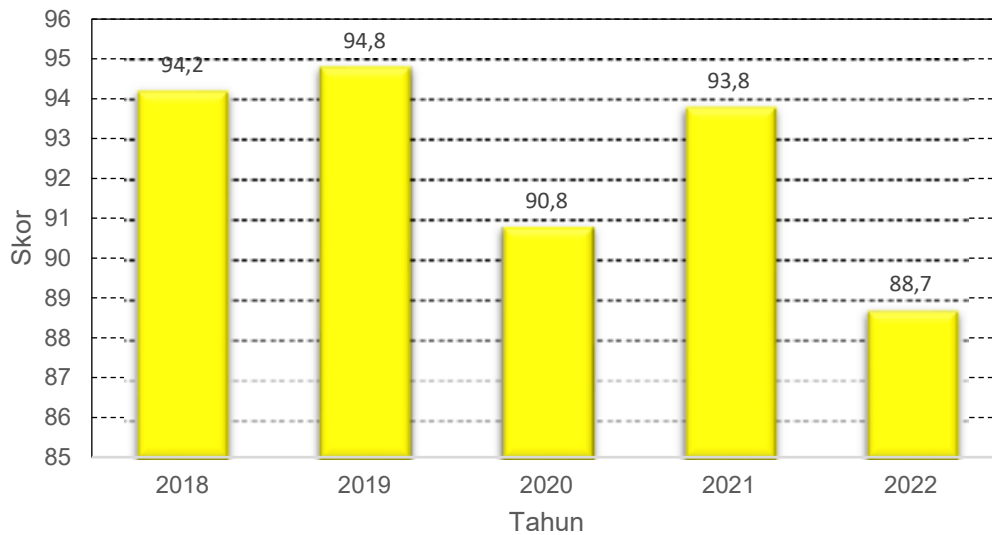
### 1.1. Analisa Capaian Skor PPH Ketersediaan

Realisasi 2022 dibandingkan dengan realisasi 2021, mengalami kenaikan dibanding realisasi 2022, karena pasokan meningkat sesuai dengan permintaan pasar untuk kebutuhan konsumsi rumah tanggadan perdagangan kuliner. Tahun 2021 pasokan menurun karena permintaan pasar rendah (adanya pembatasan aktivitas masyarakat), pada tahun 2022 mulai menggeliat karena permintaan pasar terhadap bahan pangan meningkat adanya kelonggaran pembatasan kegiatan di masyarakat, banyak event-event dilakukan yang sudah barang tentu kebutuhan logistik meningkat, Target tercapai di tahun 2022, karena permintaan pasar meningkat Prediksi untuk target tahun 2026 berdasar realisasi 2022 ini, dapat dimungkinkan tercapai, dengan upaya terus melakukan koordinasi yang intensif dan kerja sama dengan berbagai daerah pemasok bahan pangan untuk kota Surakarta.

Table 3.8 Realisasi IKU 2 2018-2022

No	Indikator	Satuan	2018		2019		2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2	Skor PPH Konsumsi	angka	84	94,2	84	94,8	85	90,8	86	92,8	90	88,7

Grafik 3.2 Skor PPH Konsumsi



Dari tabel di atas menunjukkan Skor PPH Konsumsi dari tahun 2019-2022 mengalami penurunan hal ini karena kondisi pandemic covid19 adanya pembatasan (PPKM) banyak berpengaruh terhadap ruang gerak perekonomian di masyarakat yg berakibat daya beli menurun sehingga pengeluaran untuk kebutuhan pangan menjadi turun juga yang berakibat asupan konsumsi terbatas keberagamannya dan tidak berimbang dari ke 9 (sembilan) kelompok bahan pangan

Tabel 3.9 Capaian IKU 2 tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2026 (Akhir RPJMD)	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
2	Skor PPH Konsumsi	angka	86	92,8	107,9	90	88,7	98	90,8	97

Tabel 3.10 Skor PPH Konsumsi Penduduk Berdasarkan Data Susenas Kota Surakarta

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/Kapita/Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal/Kapita	%	% AKE*	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	263,9	1.095	57,7	52,1	0,5	28,8	26,1	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	31,9	35	1,8	1,7	0,5	0,9	0,8	2,5	0,8
3	Pangan Hewani	95,0	242	12,7	11,5	2,0	25,5	23,0	24,0	23,0
4	Minyak dan Lemak	25,6	227	12,0	10,8	0,5	6,0	5,4	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	1,6	9	0,5	0,4	0,5	0,2	0,2	1,0	0,2
6	Kacang-kacangan	27,7	69	3,6	3,3	2,0	7,3	6,6	10,0	6,6
7	Gula	18,4	70	3,7	3,3	0,5	1,8	1,7	2,5	1,7
8	Sayur dan Buah	229,4	111	5,9	5,3	5,0	29,3	26,5	30,0	26,5
9	Lain-lain	98,7	40	2,1	1,9	-	-	-	-	-
	Total		1.898	100,0	90,4		99,8	90,2	100,0	88,7

Keterangan =\*) Angka Kecukupan Energi (2.100 Kkal / Kapita / hari)

Dilihat dari data Skor Aktual semua Kelompok pangan konsumsinya telah melampaui ideal. Oleh karena itu perbaikan pola konsumsi masyarakat Kota Surakarta bisa dikatakan baik meskipun dari target untuk tahun 2022 skor PPH adalah 90 tetapi hasil perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 88,7, namun demikian bila ditelusur dari kelompok bahan pangan tersebut sudah mencapai atau memenuhi skor aktual.

Dari tabel diatas diketahui kualitas keberagaman konsumsi energi warga Kota Surakarta masih masuk kategori sedang, berdasarkan kategori skor PPH > 90 = Baik, **80 – 90 = Sedang**, < 80 = Kurang. Dapat dilihat hasil Skor PPH sebesar 88,7 masih masuk kategori sedang dengan Angka menggunakan Kecukupan Energi : 2,100 KKal/Kapita/Hari dari angka 100 (sempurna).

Sehingga masih perlu upaya meningkatkan keberagaman Konsumsi Pangan Masyarakat terutama untuk meningkatkan konsumsi kelompok pangan Umbi – umbian; sayur dan buah; Gula; Buah biji berminyak, dan pangan hewani.

Konsumsi Umbi – umbian diharapkan menjadi pengganti produk pangan berbahan dasar tepung terigu sehingga penyajian snack atau kudapan dapat menggunakan bahan baku pangan lokal yang berasal dari umbi – umbian.

Untuk itu diperlukan Sosialisasi tentang B2SA dan produk pangan bahan lokal untuk meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Kota Surakarta. Pada Tahun 2022 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah melaksanakan Sosialisasi B2SA melalui kegiatan : Pemberian Contoh menu B2SA bagi anak sekolah, pembagian Leaflet kepada masyarakat dan pembuatan Video tentang B2SA. Dengan kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi di tahun yang akan datang.

## 1.2. Analisa Capaian Skor PPH Konsumsi

Realisasi 2022 dibanding realisasi 2021, mengalami penurunan dibanding realisasi tahun 2021, karena data yang dipakai untuk perhitungan PPH konsumsi 2022 adalah hasil susenas tahun 2021 dan masih dalam kondisi pandemi covid19, sehingga keterjangkauan masyarakat dalam pembelian bahan pangan lebih rendah dibanding tahun 2020 (PPH konsumsi 2021). Dari hasil susenas tahun 2021 dapat dilihat adanya peningkatan konsumsi *frozen food* yang mempengaruhi keberagaman konsumsi yang dapat dilihat dari hasil olahan skor PPH untuk konsumsi sayur dan umbi-umbian masih jauh dari skor ideal dan konsumsi pangan hewannya turun dibanding tahun 2021, tetapi masih lebih tinggi dari skor idealnya.

Realisasi 2022 dibanding target 2022, di tahun 2022 tidak memenuhi target karena imbas dari pandemi covid-19, daya beli masyarakat masih rendah, yang dapat dilihat dari hasil perhitungan skor PPH konsumsi untuk memenuhi



kebutuhan energi masih kurang, apalagi untuk keberagaman, dari segi kuantitas belum dapat memenuhi angka kecukupan energi, apalagi dari segi kualitas keberagaman.

Prediksi realisasi tahun 2022 dibandingkan target 2022, meskipun realisasi 2022 lebih rendah dari 2021 dan realisasi 2022 tidak memenuhi target 2022, namun tetap dimungkinkan prediksi di tahun 2022 akan memenuhi target di tahun 2022 tersebut. Disamping berupaya gigih dan antusias akan melaksanakan sosialisasi B2SA dan produk pangan bahan lokal yang intensif untuk meningkatkan Skor PPH Konsumsi Kota Surakarta, melalui kegiatan : Pemberian Contoh menu B2SA bagi anak sekolah, pembagian leaflet kepada masyarakat dan pembuatan Video tentang B2SA. Dengan kegiatan, tersebut diharapkan secara rutin dapat meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi di tahun tahun mendatang

### 1.3. Perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2022 dengan Realisasi indikator kinerja Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

Realisasi Skor PPH ketersediaan dan Skor PPH Konsumsi di tahun 2022 ini masih di atas, atau lebih tinggi dari Realisasi Jateng dan Nasional, dapat dilihat pada tabel 3.4

Tabel 3.11 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan Realisasi Jateng dan Nasional

No	Indikator	Satuan	Tahun 2022			Realisasi	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Provinsi Jawa Tengah	Nasional
1	Skor PPH Ketersediaan	angka	96,8	97,87	101,1	84.81	93,51
2	Skor PPH Konsumsi	angka	90	88,7	98,5	88,6	87,2

### 1.4. Analisa Capaian PPH Ketersediaan dan PPH Konsumsi Kota Surakarta, dibandingkan dengan capaian Jawa Tengah dan Nasional

Realisasi PPH Ketersediaan dan PPH Konsumsi Kota Ska lebih baik dari realisasi Propinsi jateng dan Nasional, berarti kondisi ketersediaan bahan pangan di kota Surakarta tahun 2022 ini, tersedia cukup jumlah dan mutunya untuk dikonsumsi masyarakat, dan tingkat keberagaman bahan pangan yng dikonsumsi, serta nilai gizi yang dikandung dalam konsumsi sehari-hari di masyarakat Kota Surakarta terpenuhi, kondisi ini cukup aman dibanding rerata tingkat propinsi Jwa Tengah dan rerata Nasional.

## 2. SASARAN 1 : Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman

Tabel 3.12 Capaian Kinerja Sasaran 1.1 dan 2

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2026 (Akhir RPJMD)	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
1	Prosentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	%	96,70	98,3	101,6	97,8	90,4	92,43	100	90,4
2	Prosentase Angka Kecukupan Protein (AKP)	%	140,60	111,3	79	100	99,6	99	100	99,6

### 2.1. Analisa capaian Realisasi persentase AKE dan AKP

Mengalami penurunan dari target tahun 2022 dan dari realisasi tahun 2021 karena perhitungan yang diperoleh dari data susenas (n-1) seperti untuk perhitungan PPH konsumsi, masih dalam kondisi pandemi Covid-19, keterjangkauan masyarakat terkait daya beli bahan pangan penyumbang energi dan protein menurun. Berdasar atas olahan data, dari Angka Kecukupan Energi (AKE) diperoleh hasil Angka ketersediaan energi 3392 kkal/kap/hr (target 2500 kkal/kap/hr), tetapi konsumsi energinya 1897,80 kkal/kap/hr lebih rendah dari ideal 2100 kkal/kap/hr, sedangkan dari angka kecukupan Protein (AKP) diperoleh angka ketersediaan Protein 108,37 gram/kap/hr (target 71,6 gram/kap/hr), tetapi konsumsi proteinnya 56,80 gram/kap/hr lebih rendah sedikit dari ideal 57 gram/kap/hr), Dapat dilihat bahwa nilai ketersediaan cukup dari targetnya sedangkan nilai konsumsinya masih dibawah ideal,

Perhitungan dari Susenas 2021 ini, diperoleh bahwa 80,31 % dari penduduk kota Surakarta AKE nya dibawah 2100 Kkal/kap/hari, dan 19% dari penduduk Kota Surakarta AKE nya mendekati ideal 2100 Kkal/kap/hari, yaitu 2170 kkal/kap/hari. Dari 80,31 % tersebut terdiri 16,26% (14 % ber AKE 1600 kkal/kap/hari, 2% ber AKE 1300 Kkal/kap/hari ) dan 64.05 % (35% ber AKE 1800 Kkal/kap/hari, 28% berAKE 1700 Kkal/kap/hr). Angka 16,26% tersebut adalah masyarakat Surakarta yang mempunyai pengeluaran untuk membeli kebutuhan pangan kurang dari Rp. 749.000,00 per bulan.

Masyarakat yang ber AKE dibawah ideal 2100 Kkal/kap/hari sebesar 80,31 % dari jumlah penduduk Kota Surakarta di tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan tahun 2021 di angka 52,91%, diartikan bahwa di tahun 2022 ini mengalami penurunan dari tahun 2021, hal ini dimungkinkan karena Skor PPH Konsumsi juga mengalami penurunan.

Table 3.13 Capaian Kinerja sasaran 1.3

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2026 (Akhir RPJMD)	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
3	Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	%	89.17	99,25	111,3	76	95,63	125,8	80	119,5

Tabel 3.14 Rekap hasil uji cepat dan pengambilan sampel PSAT

Jenis Sampel	Aman	Tidak Aman	Jumlah	Prosentase Aman
Sayur	75	8	83	90,36
Buah	47	0	47	100
Beras	52	0	52	100
Biji-bijian	1	0	1	100
Jumlah Total	175	8	183	95,63

## 2.1. Analisis Capaian Persentase PSAT aman

Realisasi PSAT aman tahun 2022 mengalami penurunan dibanding realisasi tahun 2021, karena kota Surakarta bukan sebagai produsen, sehingga tidak dapat melakukan intervensi terhadap proses budidaya PSAT, namun demikian Dispangtanselau membuat laporan atas hasil pemeriksaan uji PSAT kepada Pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, agar bisa menindaklanjuti atas hasil uji PSAT tersebut. Bila dibandingkan antara realisasi dan target tahun 2022 ini realisasi persentase PSAT aman sudah memenuhi target tahun 2022 ini, Hal ini disebabkan oleh PSAT yang beredar di Kota Surakarta Sebagian besar, sudah memenuhi syarat aman dikonsumsi, beberapa upaya telah dilakukan untuk mencapai target, salah satunya dengan koordinasi dan bekerja sama dengan wilayah/daerah pemasok terkait dengan proses budi daya PSAT, agar terpenuhi kaidah keamanan pangan. Prediksi target tahun 2026 atas dasar realisasi 2022 ini, dimungkinkan akan memenuhi target, upaya yang akan dilakukan yaitu koordinasi dengan wilayah/daerah pemasok terkait dengan proses budidaya PSAT yang memenuhikaidah keamanan pangan lebih diintensifkan, dan meningkatkan dengan pengawasan keamanan pangan

## 2.1. Analisa Program

- a. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat dengan beberapa kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan dokumen neraca bahan makanan (NBM), sekaligus untuk penghitungan skor PPH ketersediaan, pemantauan stok pasokan dan harga pangan, koordinasi ke daerah pemasok bahan pangan, kegiatan pemantauan stok dan koordinasi tersebut dimaksudkan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan di

wilayah Surakarta tersedia cukup dan aman, pembinaan 27 kelompok P2L (pemberdayaan masyarakat), Terkait Program P2L Pekarangan Pangan Lestari dari Pemerintah Pusat (7 kelompok). dalam rangka penguatan ketahanan pangan di masa Pandemi ini, berupa bantuan untuk pembuatan kebun bibit, pembibitan tanaman sayuran kepada kelompok tani, kelompok wanita tani dan kelompok masyarakat. Pembinaan Toko Tani Indonesia (TTI), rencana kebutuhan pangan lokal, pengadaan dan pemeliharaan cadangan pangan yang wajib disediakan oleh kabupaten/kota penyediaan pangan 25 ton beras untuk penjagaan saat ada bencana, imbas pandemi covid 19 dan untuk menjaga inflasi agar tidak terjadi lonjakan harga sehingga harga dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, untuk penyusunan/penghitungan skor PPH konsumsi, dengan kegiatan penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita/ tahun, dengan menggunakan dasar perhitungan dari susenas tahun N-1. Pelatihan olahan pangan non beras non terigu dengan memberikan bantuan alat masak, sosialisasi dan pemberian contoh menu beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA) ke anak sekolah dari keluarga tidak mampu (gakin). Dari dukungan kegiatan kegiatan ini diperoleh perhitungan Konsumsi energi per kapita 1897,80 kkal/kapita/hari, konsumsi protein 56,80 gram/kap/hari, angka ketersediaan energi 3392 kkal/kap/hari dan angka ketersediaan protein 108,37 gram/kap/hari, anggaran program ini sebelum anggaran perubahan sebesar Rp, 1.084.294.500,00, sumber APBD dan sumber APBN sebesar Rp. 210.000.000,00, setelah anggaran perubahan Rp. 1.009.112.900,00 sumber APBD, dan sumber APBN tetap sebesar Rp. 210.000.000,00, Anggaran untuk program ini terealisasi Rp.1.141.183.688,00 atau 93,61%

- b. Program Penanganan Kerawanan pangan, kegiatan yang dilakukan penyusunan peta rawan pangan yang terdeteksi kelurahan yang rawan pangan adalah kel. types dan kelurahan danukusuman, penyaluran beras 21 ton kepada penduduk rawan pangan yang tidak mendapatkan program dari pusat PKH dan BPNT sebanyak 2100 KK dari 9100 KK (data dari Dinas Sosial), bantuan bahan pangan ke posyandu, pembinaan kawasan mandiri pangan, dari program ini didapatkan persentase penduduk rawan pangan tertangani sebesar 21 %, program ini didukung, anggaran sebelum anggaran perubahan sebesar Rp. 636.188.000,00, setelah anggaran perubahan sebesar Rp.613.098.000,00 terealisasi Rp. 589.747.500,00 atau 96,19% terserap
- c. Program Pengawasan Keamanan pangan, kegiatan yang dilakukan adalah pengawasan dan pemeriksaan Pangan segar asal tumbuhan di sejumlah pasar tradisional dan modern, karena hampir sebagian besaer bahan pangan

yang beredar di Surakarta berasal dari luar kota, banyak mengandung formalin dan pestisidajenis yang diperiksa, beras sayur, buah dan biji-bijian, diperoleh hasil persentase beras aman 100%, sayur aman 90,36 % buah aman 100% dan biji-bijian aman 100%, sebenarnya dimungkinkan bahan pangan tsb mengandung bahan berbahaya tsb, tetapi masih di bawah ambang batas aman untuk dikonsumsi. Kegiatan lain yang dilakukan adalah pengadaan sarpras pengujian mutu dan keamanan pangan, juga pendampingan terhadap pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan terkait penguatan kelembagaan dan untuk registrasi ijin usahanya. Program ini didukung dengan anggaran sebelum anggaran perubahan sejumlah Rp, 231.896.738,00 setelah anggaran perubahan sebesar Rp. 149.388.400,00, terealisasi sebesar 147.966.959,00 atau 99,05% terserap

## 2.1. Dokumentasi



Pemantauan stok bahan pangan



Pelatihan Olahan Pangan KMP WA bu Tanti



Bantuan alat pengolahan pangan ke KMP



Sosisialisasi FSVA



Pengecekan cadangan pangan beras



Bantuan beras cadangan pangan untuk masyarakat rawan pangan kel Joglo



Bantuan stimulan bahan pangan untuk posyandu balita kel Tipes



Toko Mitra Tani Solo Sejahtera kel Sondakan



Pembinaan Toko Mitra Tani



Evaluasi PPH Konsumsi



Pembagian contoh menu B2SA di sekolah



P2L kelurahan Danukusuman



P2L kelurahan Jajar



P2L Kelurahan Jebres



JKPD pasar modern



JKPD pasar tradisional



Pemeriksaan PSAT sayur dan buah



Pemeriksaan PSAT beras



### 3. SASARAN 2 : Meningkatkan Produksi Pertanian dan Peternakan

Tabel 3.15 Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2026 (Akhir RPJMD)	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
1.	Produksi Pertanian	Ton	4800	5108.36	106,4	4866	5881,1	120,3	5460	107,7

#### 3.1. Analisa Capaian

Produksi pertanian yang dimaksud adalah produksi tanaman pangan (padi, jagung), palawija (kacang tanah), hortikultura (cabai, terong, tomat, sawi, kangkung, bayam, mangga, pisang, pepaya), biofarmaka (jahe) dan produksi peternakan merujuk pada kementan no 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 dan yang ada di Kota Surakarta.

Realisasi produksi pertanian tahun 2022 dibanding tahun 2021 meningkat, diperoleh data produktivitas padi 67 kw/ha, produksinya 673,8 ton, produktivitas hortikultura 9,7 kw/ha produksinya 30,325 ton dan produksi peternakan 5144 ton sehingga produksi pertanian sebesar 5881,1 ton. Hal ini banyak didukung dari hasil pemanfaatan pekarangan untuk *urban farming* (terutama hortikultura) lebih optimal terutama di Kecamatan Laweyan dan Kecamatan Banjarsari dan pemanfaatan untuk ternak ayam dengan bantuan ternak ayam. Kenaikan lebih signifikan pada hortikultura. Pemanfaatan pekarangan didukung oleh kesadaran/ antusiasme masyarakat dan ditunjang oleh program-program dari pemerintah. Adanya event-event kota misal Lomba Desa, Germas, lomba PKK, Kampung iklim, kampung KB menambah animo masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan, tahun 2021 karena adanya pandemi event-event tersebut tidak bisa berlangsung.

Realisasi 2022 melebihi target 2022 dikarenakan pemanfaatan pekarangan untuk *urban farming* lebih optimal terutama di Kecamatan Laweyan dan Banjarsari serta adanya bantuan ternak. Kenaikan produksi terbesar pada hortikultura karena pada tahun 2022 pemanfaatan pekarangan didukung oleh kesadaran/ antusiasme masyarakat dan ditunjang oleh program-program dari pemerintah, dan kerjasama yang baik dengan pemangku wilayah. Realisasi sampai dengan 2022 mencapai 41,18% dan pada tahun 2026 dimungkinkan bisa memenuhi target, dengan melihat realisasi tahun 2022 di peternakan dan hortikultura yang cukup besar, meskipun dari produksi tanaman pangan dimungkinkan akan menurun karena alih fungsi lahan dan konsekuensi adanya Perda RTRW nomor 4 Tahun 2021, tetapi Dispangtan akan mengupayakan dari sektor peternakan dan hortikultura dengan memaksimalkan pemanfaatan

pekarangan dan penyediaan sarpras pemotongan hewan serta peningkatan populasi ternak

### **3.1. Analisa Program**

- a. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian. dengan kegiatan pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian-peternakan bibit/benih (tanaman dan pupuk, ternak ayam dan pakan), pendampingan dan pemeriksaan obat hewan, pelatihan budidaya ayam buras, pembinaan kelompok tani ternak, bantuan ayam buras untuk dibudidayakan untuk 80 KK, Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah, peningkatan kompetensi SDM peternak, membantu keluarga miskin (gakin), penyediaan sumber protein hewani bagi masyarakat, hasil dr program ini bisa dihitung produktivitas padi 67 kwintal/ha, produktivitas hortikultura 9,69 kwintal/ha dan populasi ternak 25,836 ekor (sapi, kambing, ayam). Anggaran program ini sebelum anggaran perubahan sejumlah Rp. 568.599.555,00 setelah anggaran perubahan sebesar Rp. 539.002.755,00, terealisasi Rp. 527.294,450,00 atau 97,83% terserap
- b. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dengan kegiatan pembangunan 1 unit talud, dan perbaikan 5 pintu air, dengan hasil persentase luasan lahan pertanian yang diairi, perbaikan rumah potong hewan (kambing) dimungkinkan produksi hasil peternakan meningkat. Program ini didukung anggaran sebelum anggaran perubahan 518.341.000,00 setelah anggaran perubahan sebesar Rp. 763.364.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 711.957.344,00 atau 93,27% terserap
- c. Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dengan kegiatan, pendampingan ke kelompok tani padi terkait dengan penanggulangan organisme pengganggu tanaman (OPT), dengan hasil luasan yang tertangani 15 ha, Program ini didukung anggaran, sebelum anggaran perubahan Rp. 38.000.000,00, setelah anggaran perubahan sebesar Rp. 38.000.000,00, terealisasi sebesar Rp. 36.297.000.00 atau 95,52% terserap
- d. Program Penyuluhan Pertanian, dengan kegiatan pendampingan dan pelatihan ke kelompok tani termasuk kelompok Wanita tani (104), hasil yang didapat persentase pertumbuhan kelompok tani sebesar 5%, Anggaran pada program ini sebelum anggaran perubahan sebesar Rp 207.035.000,00 setelah anggaran perubahan sebesar Rp. 224.801.800,00, terealisasi Rp. 214,989.400,00 atau 95,64%.terserap

### 3.1. Dokumentasi



Pembangunan talud



Pembangunan pintu air



Pelatihan Hidroponik



Sekolah lapang kelompok tani



Praktek sekolah lapang



Bantuan tanaman buah



Bantuan tanaman sayur



Penyuluhan kepada kelompok Wanita Tani (KWT)



Bantuan bibit ayam dan kendang



Ubinan untuk menghitung produktivitas padi



Outing Clas di Taman Winasis

#### 4. SASARAN 3. Meningkatnya Kesehatan hewan/Kesehatan masyarakat veteriner dan Produk pangan asal hewan layak konsumsi

Tabel 3.16 Capaian Kinerja Sasaran 3.1

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
1	Angka Status Kesehatan Hewan	%	70	95	135,7	72	81,82	113,6	82,5	99

##### 4.1. Analisa Capaian Kinerja dan Program

Angka Status Kesehatan Hewan diperoleh dari rata - rata **A+B+C+D**, dimana:

**A** :Prosentase penyakit PHMS yang dipertahankan sebagai "Status Bebas" yaitu jumlah penyakit yang dipertahankan dibagi jumlah penyakit hewan yang ditetapkan status bebas kali 100%

Penyakit status bebas : sesuai dengan keputusan menteri pertanian (rabies)  
 $1/1 \times 100\% = 100\%$

**B** :Prosentase penyakit 3HMS yang dapat dikendalikan dan ditanggulangi yaitu penyakit PHMS yang dapat dikendalikan dan ditanggulangi dibagi 11 penyakit PHMS kali 100%

11 jenis penyakit adalah penyakit hewan menular dan zoonosis yang termasuk endemis, masih ada kasus dan/atau mengancam di Kota Surakarta, yaitu Anthrax, Salmonellosis, AI (HPAI dan LPAI), Helminthiasis, Leptospirosis, Brucellosis (B. suis), Jembrana, Surra, Toxoplasmosis, Cysticercosis dan African Swine Fever (ASF),  $3/11 \times 100\% = 27,27\%$

**C** :Prosentase penyakit PHMS yang dibebaskan yaitu jumlah penyakit PHMS yang dibebaskan dibagi jumlah penyakit PHMS yang diusulkan untuk pembebasan kali 100%

$1/1 \times 100\% = 100\%$

Penyakit yang dibebaskan : disesuaikan dengan program provinsi dan pusat (brucella abortus)

**D** :Prosentase penyakit non PHMS yang tertangani yaitu jumlah penyakit non PHMS tertangani (hidup) dibagi jumlah hewan non PHMS yang diperiksa kali 100

$6/6 \times 100\% = 100\%$

Sehingga angka status Kesehatan hewan diperoleh dari Rerata **A+B+C+D**  
 $= 317,265 / 4 = 81,82\%$

Target 72% tahun 2022 bisa terpenuhi, bahkan melebihi, yaitu 81,82% hal karena adanya program pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan

masyarakat veteriner dengan kegiatan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis dengan biosekuriti (penyemprotan desinfektan, vaksinasi untuk anthraks dan Rabies, surveilans AI dan ND, PMK) serta pengobatan hewan yang sakit, pembagian obat cacing, sosialisasi, koordinasi dengan aparat terkait yang intensif dan berkelanjutan. Dibandingkan dengan target 2026 dimungkinkan mencapai target karena pada penyakit endemis sudah dapat diantisipasi, sedang penyakit yang baru dapat dicegah kemunculannya karena sudah diketahui cara pencegahan dan pengendalian. Peran UPT Puskewan dalam pelayanan jasa medik veteriner terkait pemeriksaan dan pengobatan hewan.

Kebijakan pemerintah pusat tentang target Pembebasan PHMSZ Prioritas di Indonesia, yaitu:

- a. Indonesia Bebas Rabies Tahun 2028 (Jawa Tengah sudah bebas Rabies sejak tahun 1997 sesuai dengan SK Menteri Pertanian 892/Kpts/TN.560/9/1997).
- b. Indonesia Bebas Avian Influenza Tahun 2028.
- c. Indonesia Bebas Brucellosis Tahun 2025.

Khusus untuk penyakit Anthrax, Pemerintah Pusat tidak menargetkan Indonesia Bebas Anthrax mengingat Penyakit Anthrax merupakan penyakit tanah, dalam artian bahwa bakteri Anthrax bisa bertahan dalam tanah selama 60 tahun dan apabila kondisi memungkinkan, bakteri tersebut bisa menjadi potensial sehingga dapat menginfeksi hewan dan manusia (bersifat zoonosis). Maka dari itu, kita wajib mewaspadaai munculnya penyakit Anthrax ini dengan melakukan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian.

Tabel 3.17 Capaian Kinerja Sasaran 3.2

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
2	Rasio PPAH layak konsumsi	%	70	96,48		72,5	98,27	135,54	90,25	108,88

#### 4.1. Analisa capaian Kinerja dan Program

Produk pangan asal hewan (PPAH) yang dimaksud adalah daging sapi, kambing, domba, unggas, babi, telur, susu, Rasio PPAH layak konsumsi dihitung dari jumlah PPAH layak konsumsi yaitu 11.700 ton dibagi jumlah PPAH yang beredar 12,213 ton dikali 10% = 98,27%

PPAH layak konsumsi didapat dari perhitungan jumlah daging (sapi, kambing, ayam) asuh 5568 ton, jumlah daging babi layak konsumsi 2072 ton, jumlah telur layak konsumsi 127.750 butir dan jumlah susu layak konsumsi 73.000 liter

Realisasi PPAH layak konsumsi tahun 2022 meningkat dibanding tahun 2021 penyebabnya adalah meningkatnya kualitas telur layak konsumsi, berdasar hasil lab 100% sampel bebas cemaran bakteri, hal ini dipengaruhi oleh perlakuan pedagang telur yang sudah paham dan sadar untuk memisahkan antara telur kotor dan telur bersih, telur utuh dan telur pecah. Peningkatan kualitas telur ini merupakan hasil dari sosialisasi kepada pedagang grosir telur. Hal ini cukup efektif terbukti dengan hasil lab telur tidak mengandung cemaran bakteri.

Dari hasil olahan data penyumbang PPAH tidak layak konsumsi berasal dari daging ayam, karena tingginya cemaran colliform yang dibuktikan dari hasil lab. Cemaran colliform berasal dari cemaran lingkungan, kondisi tempat pemasaran yang kurang higienis menyebabkan daging ayam terkontaminasi. Cemaran colliform ini juga disebabkan oleh peralatan penanganan daging yang sudah tidak memenuhi syarat higine sanitasi.

Realisasi 2022 dibanding target 2022 melebihi target, capaiannya sebesar 135,54%, hal ini disebabkan upaya yang sudah dilaksanakan oleh Dispangtan secara rutin dengan program pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner dengan kegiatan pemeriksaan PPAH di pasar tradisional dan modern, berupa sosialisasi, pengawasan dan pembinaan, serta pemeriksaan hewan Kurban (saat hari raya Kurban).

Semua aktivitas tersebut agar PPAH yang beredar di pasaran layak dan aman dikonsumsi serta diharapkan masyarakat juga bisa mengetahui PPAH yang baik sehingga dapat memilih PPAH yang baik saja, meningkatnya kesadaran masyarakat Kota Surakarta untuk mencari atau memilih PPAH yang layak konsumsi, tidak membahayakan kesehatan masyarakat, sehingga dipasar sudah mengalami pemilihan otomatis, yang tidak layak konsumsi akan tidak dipilih oleh masyarakat. Namun demikian masih tetap harus dilakukan program kegiatan yang mendukung Rasio PPAH layak konsumsi yang bersifat menjaga dan preventif untuk segala resikonya. dalam artian bahwa PPAH dijamin layak dan aman dikonsumsi oleh masyarakat kota surakarta.

Dibandingkan dengan target 2026 dimungkinkan mencapai target dengan upaya sosialisasi, pengawasan dan pembinaan secara rutin dan berkelanjutan, pemberian bantuan alat penanganan daging dan pendampingan unit usaha produk hewan.

Terkait dengan efisiensi Sumber daya yang lain, yang dilakukan Dinas dalam peningkatan PAD, adalah sbb

- a. UPT Puskesmas dengan meningkatkan kualitas pelayanan Klinik Hewan dengan pengembangan inovasi sistem daftar online dg aplikasi SINIKITA, guna memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan Hewan

- b. UPT RPH dengan pemenuhan standar pelayanan prima dan terkait dengan daging aman sehat utuh halal (sertifikat ISO, NKV dan halal) dan peningkatan pemeriksaan antemortem dan postmortem, serta perbaikan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan teknis pemotongan hewan. Dan upaya koordinasi dan pembinaan ke pengusaha kios daging untuk penggunaan Rumah potong hewan guna kualitas PPAH

Program Pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner didukung dengan anggaran, sebelum perubahan sebesar Rp. 602.797.400,00, setelah anggaran perubahan sebesar Rp. 583.147.000,00, terealisasi Rp. 501.522.719,00 atau 86% terserap.

Terkait dengan Program perijinan usaha pertanian, tahun 2022 ini diampu oleh Bidang Veteriner, karena Sebagian besar perijinan di perkotaan terkait dengan bidang veteriner salah satunya adalah ijin praktek dokter hewan, sekaligus dengan pengawasan dan pembinaannya, kegiatan yang lain adalah pembinaan dan pengawasan izin usaha pertanian, Izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan, fasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan Izin Usaha pengecer obat hewan, pengawasan pelaksanaan izin usaha pengecer obat hewan. Program ini didukung dengan anggaran, sebelum anggaran perubahan sebesar Rp. 14.950.000,00, setelah anggaran perubahan sebesar Rp. 14.538.000,00 terealisasi sebesar Rp. 13.367.000,00 atau 91,95% terserap.

#### 4.1. Dokumentasi



Penyemprotan Desinfektan





Vaksinasi Rabies



Vaksinasi PMK



Pemeriksaan permohonan NKV di Lotte Mart



Kunjungan permohonan NKV cold storage penyimpanan daging



Sosialisasi PPAH layak konsumsi di Kec Jebres



Sosialisasi PPAH layak konsumsi di Kec Laweyan



Sosialisasi PPAH layak konsumsi di kec Banjarsari



Pengawasandan pembinaan PPAH di Pasar Gede



Surveilans Avian Influenza



Pemeriksaan Hewan Qurban (ante mortem)



Pemeriksaan daging dan hati Qurban (*post mortem*)



Aplikasi SINIKITA di UPT Puskesmas



Dialog Interaktif LSD



Pembinaan pada Pengusaha Jagal



Sosialisasi pada Juru sembelih

## 5. SASARAN 4. Meningkatnya produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan olahan ikan

Tabel 3.18 Capaian Kinerja Sasaran 4

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)	
			Target	Realssi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
1	Produksi Ikan	ton	250,6	250,1	99	246	251,06	102	258,5	97

### 5.1. Analisa Capaian Kinerja dan Program

Produksi ikan 251.06 ton adalah Jumlah produksi perikanan tangkap 1,69 ton + produksi perikanan budidaya 43,3 ton ( dari UPR 41,6747 ton, dan dari UPT AUP 1,6253 ton)+ produksi olahan ikan 206,07 ton

#### a. Produksi perikanan tangkap

Produksi perikanan tangkap meningkat dari tahun 2021 karena adanya restocking dan bertambahnya jumlah nelayan PUD (Perairan Umum Daratan). Pada tahun 2021 belum dilakukan restocking dari APBD, didukung program pengelolaan perikanan tangkap kegiatan yang dilakukan restocking

ikan nila di kali Toklo Kel. Keprabon 5.000 ekor, Kali Anyar kel. Nusukan 5.000 ekor, Kali Gajahputih Kel. Sumber 9.000 ekor, Kali Pepe Kel Sudiroprajan 5.000 ekor, Kali Bengawan Solo Kel Pucangsawit 2.000 ekor

Realisasi tahun 2022 ini melebihi target, karena adanya pelaksanaan restocking dilakukan melalui koordinasi dengan stakeholder wilayah, penyediaan benih ikan dengan syarat benih unggul berasal dari dari Balai Benih Ikan, yang mempunyai induk bersertifikasi. Kenaikan jumlah hasil tangkapan juga dipengaruhi oleh kenaikan frekuensi trip dalam menangkap ikan dari 4 kali dalam sebulan menjadi 7 kali dalam sebulan yang dipengaruhi oleh banyaknya stok ikan di perairan umum.

Prediksi di tahun 2026, sampai dengan 2022 ini sudah mencapai 42% dari target tahun 2026, dimungkinkan, capaian akhir tahun 2026 tercapai, hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai target akhir tahun 2026 adalah akan melakukan restocking setiap tahun baik dari dana APBD maupun dari CSR, program pengelolaan perikanan tangkap didukung dengan anggaran, sebelum anggaran berubah sebesar Rp. 50.000.000,00 dan setelah anggaran perubahan tetap sebesar Rp. 50.000.000,00, terealisasi sebesar Rp. 47.767.600,00 atau 95,54% terserap.

#### **b. Produksi perikanan budidaya**

Produksi perikanan budidaya tahun 2022 ini meningkat dari tahun 2021 karena bertambahnya kelompok perikanan yang berbudidaya ikan dari 17 kelompok di tahun 2021 menjadi 31 kelompok di tahun 2022. Bertambahnya kelompok karena adanya pembinaan dan pendampingan oleh penyuluh perikanan, didukung program pengelolaan perikanan budidaya, dengan adanya Bantuan sarana prasarana budidaya ikan pada tahun 2022 bantuan yumina bumina dan budikdamber lebih banyak yaitu 13 kelompok, sedang di tahun 2021 10 kelompok. bantuan untuk meningkatkan produksi benih berupa sarana prasarana pembenihan antara lain induk lele, induk koi, kolam, pakan, obat-obatan.

Realisasi tahun 2022 ini melebihi target karena adanya bantuan sarana prasarana budidaya ikan yang diberikan berkualitas baik, peningkatan SDM dengan adanya pelatihan budidaya ikan, sosialisasi perikanan dan pendampingan oleh penyuluh secara intensif memberikan dampak pada hasil budidaya ikan.

Prediksi realisasi dengan target di tahun 2026, dimungkinkan dapat tercapai, krn sampai dengan tahun 2022 sdh mencapai 32,89% dari target akhir tahun 2026, namun demikian upaya pencapaian target akhir tahun 2026 tetap dengan intensif masih perlu diupayakan dengan memberikan bantuan

sarparas, pendampingan kelompok oleh penyuluh, pembentukan kelompok baru, sosialisasi dan pelatihan perikanan. Dalam pencapaian target 2026 Dispangtan akan membuat inovasi pembuatan pakan tambahan alternatif untuk menekan biaya pakan pabrikan. Program yang mendukung pada sasaran ini terkait dengan perikanan budidayanya, sebelum anggaran perubahan sebesar Rp. 501.575.760,00, setelah anggaran perubahan sejumlah Rp 545.583.244,00, terealisasi Rp. 519.338.121,00 atau 95,19% terserap.

### **c. Produksi pengolahan ikan**

Produksi pengolahan ikan meningkat dari tahun 2021, karena bertambahnya unit pengolah ikan dari 13 UPI menjadi 16 UPI, bertambahnya UPI diengaruhi oleh pemanfaatan hasil budidaya yang diolah sendiri oleh kelompok tersebut. Pendampingan lebih intensif oleh penyuluh perikanan dan didukung dengan program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dengan kegiatan penambahan bantuan alat pengolahan ikan.

Jumlah produksi pengolahan ikan melebihi target karena fasilitasi akses pemasaran berupa bazar ikan, gelar pasar tani, sosialisasi gemarikan dan pelatihan pengolahan ikan. Hasil pelatihan pengolahan ikan memberikan dampak terhadap usaha pengolahan yaitu pelaku usaha menerapkan hasil pelatihan.

Prediksi produksi pengolahan ikan tahun 2022 dibanding target akhir 2026 dimungkinkan tercapai, karena sampai dengan tahun 2022 ini produksi olahan ikan mencapai 37,60%, dari target tahun 2026, upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target akhir 2026 yaitu dengan pendampingan yang lebih intensif, pelatihan pengolahan ikan, membantu strategi pemasaran olahan ikan dan mengikut sertakan pelaku UPI dalam event-event yang diselenggarakan dinas maupun OPD lainnya. Anggaran program ini, sebelum anggaran perubahan sebesar Rp. 432.325.725,00, setelah anggaran perubahan sebesar Rp. 437.620.225,00, terealisasi sebesar Rp. 404.275.820,00 atau 92,38% terserap.

## **5.2. Analisa efisiensi penggunaan SUMBER DAYA**

Dalam rangka upaya untuk peningkatan PAD, UPT AUP, melakukan hal-hal sebagai berikut

- a. Membina koperasi pedagang ikan, (tahun 2021) yang bertujuan sebagai wadah untuk peningkatan kesejahteraan para pedagang ikan, sehingga bisa berjualan di pasar Balekambang secara berkelanjutan

- b. Mengajak dan menggandeng kelurahan dan kelompok masyarakat dalam penyediaan ikan yang dibudidayakan di saluran saluran air,(tebar ikan), disamping berguna memenuhi ketersediaan konsumsi ikan di tingkat lingkungan kelurahan juga untuk menjaga saluran air dari sampah, dengan membeli benih ikan di UPT AUP.
- c. Menggandeng mahasiswa dan UPR untuk membantu pembenihan ikan Koi
- d. Memberikan jasa layanan antar benih ikan.

### 5.3. Dokumentasi



Penyerahan Sarana Budikdamber



Bantuan Sarpras pembenihan Ikan Kelompok Pembudidaya Ikan



Bantuan Kolam Ikan



Pelatihan Budidaya Ikan Konsumsi



Pelatihan Budidaya ikan Hias



Pelatihan pengolahan ikan



Bantuan alat ke kelompok pengolah Ikan



Bantuan col box untuk koperasi pedagang ikan





Pasar Ikan Balekambang



Tebar Mina di sungai Toklo Kelurahan Keprabon



Outing class UPT Aneka Usaha Perikanan

**6. SASARAN 5. Meningkatnya kualitas dan keefektifan perencanaan dan pencapaian kinerja OPD agar efektif dan efisien**

Tabel 3.19 Capaian Kinerja Sasaran 5

No	Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
1	Nilai PMPRB	angka	33,6	33,7	100,2	33,7	33,86	100,4	33,9	99

**6.1. Analisa Capaian Kinerja**

**a. Realisasi 2022 dibandingkan dengan realisasi 2021**

Nilai PMPRB didukung oleh nilai SKM, nilai maturitas kelembagaan, nilai SAKIP dan nilai SPIP, Realisasi tahun 2022 melebihi realisasi tahun 2021, disebabkan dari kenaikan pencapaian di Maturitas Kelembagaan, SKM, dan SAKIP. Dari penilaian 8 area RB, ada beberapa yang mengalami peningkatan, salah satunya adalah area penataan tata laksana, dimana tahun 2021 OPD belum menyusun peta proses bisnis, di tahun 2022 OPD sudah menyusun peta proses bisnis.

Nilai SKM realisasi tahun 2022 melebihi tahun 2021 disebabkan rekomendasi SKM tahun 2021 bisa dipenuhi pada tahun 2022, sehingga respon dari stakeholder penerima manfaat pelayanan Dispangtan menjadi lebih baik. Respon aduan bisa dipenuhi sesuai SOP Pelayanan Pengaduan

Nilai maturitas kelembagaan Realisasi tahun 2022 melebihi realisasi tahun 2021, berdasarkan variabel penilai maturitas kelembagaan, dari 11 variabel terdapat 6 variabel dengan nilai tertinggi, variabel tersebut adalah perencanaan pembangunan daerah, Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, SOP pelayanan perangkat daerah, Manajemen risiko pelaksanaan tugas aparatur dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur serta Budaya Organisasi Perangkat Daerah.

Nilai Sakip realisasi tahun terakhir 77,30 meningkat dari tahun sebelumnya 76,88 hal ini karena adanya peningkatan SDM yang bertanggung jawab, merupakan bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

Nilai SPIP Realisasi tahun 2022 lebih rendah dari tahun 2021, hal ini karena adanya perubahan prosedur penilaian SPIP.

Realisasi Nilai PMPRB tahun 2022 melebihi target 2022, capaian sebesar 100,47%, disebabkan dari pencapaian yang cukup baik di SKM, Maturitas kelembagaan, SAKIP, dan SPIP. Dari penilaian 8 area RB, ada

beberapa yang mengalami peningkatan, salah satunya adalah area penataan tata laksana. Pada tahun 2022 OPD sudah menyusun peta proses bisnis.

Realisasi Nilai SKM tahun 2022 melebihi target 2022, capaian sebesar 101,37%, disebabkan rekomendasi SKM tahun 2021 bisa dipenuhi pada tahun 2022, sehingga respon dari stakeholder penerima manfaat pelayanan dispangtan menjadi lebih baik. Respon aduan bisa dipenuhi sesuai SOP Pelayanan Pengaduan

Realisasi Nilai Maturitas kelembagaan tahun 2022 melebihi target 2022, capaian sebesar 117,50% terdapat 6 variabel dengan nilai tertinggi, variabel tersebut adalah perencanaan pembangunan daerah, Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah, SOP pelayanan perangkat daerah, Manajemen risiko pelaksanaan tugas aparatur dan Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur serta Budaya Organisasi Perangkat Daerah

Realisasi Nilai SPIP tahun 2022 melebihi target 2022, capaian sebesar 102,55%, hal ini karena meningkatnya pemahaman terkait risiko oleh semua pegawai, sehingga penentuan resiko sampai dengan pengendalian dapat dilaksanakan dengan baik.

#### **b. Realisasi tahun 2022 dibanding target tahun 2026**

Dilihat dari realisasi tahun 2022, Nilai PMPRB Dispangtan dimungkinkan mencapai dapat mencapai target 2026 yang sudah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Upaya yang akan dilakukan yaitu mengoptimalkan SDM dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana. Optimalisasi SDM meliputi pemahaman pelaksanaan PMPRB dan meningkatkan kualitas kinerja pegawai.

Dilihat dari realisasi tahun 2022, Nilai SKM Dispangtan dimungkinkan dapat mencapai target 2026 yang sudah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Upaya yang akan dilakukan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan baik dari SDM maupun sarana prasarana.

Dilihat dari realisasi tahun 2022, Nilai Maturitas Kelembagaan Dispangtan dimungkinkan dapat mencapai target 2026, yang sudah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Upaya yang akan dilakukan yaitu meningkatkan 5 variabel yang masih kurang dan mempertahankan 6 variabel yang nilainya sudah tinggi. Variabel yang kurang yaitu Pengembangan Inovasi Pelayanan Perangkat Daerah dan variabel Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Perangkat Daerah.

Dilihat dari realisasi tahun 2022, Nilai SPIP Dispangtan dimungkinkan dapat mencapai target 2026, yang sudah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Upaya yang akan dilakukan yaitu meningkatkan komunikasi dan koordinasi tentang resiko dan pengendalian yang harus dilakukan. Sasaran 5 ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang kegiatannya adalah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Program ini didukung dengan anggaran, sebelum anggarannya perubahan sebesar Rp. 12.096.246.904,00, setelah anggaran perubahan sebesar Rp. 13.002.706.539,00, terealisasi sebesar Rp. 11.164.880.617,00 atau 85,87% terserap.

### C. REALISASI ANGGARAN TOTAL

Pelaksanaan Anggaran Dispangtan tahun 2022, Dinas dengan ke 3 (tiga) UPT nya yang meliputi 3 urusan dan penunjangnya dan terdiri dari 13 program 35 kegiatan dan 95 sub kegiatan dengan total anggaran sebelum Perubahan sebesar Rp. 17.192.250.582,00 setelah Perubahan sebesar Rp. 18.180.363.363,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.020.588.218,00 atau 88,12 % terserap.

Tidak terealisasi sebesar Rp.2.159.775.145,00, terdiri dari gaji dan tunjangan sebesar Rp. 1.123.975.923,00, dan sebesar Rp. 1.035.799.222,00 dari efisiensi nilai kontrak pengadaan barang/jasa dan harga di bawah SHS

Tabel 3.20 Realisasi anggaran 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
1	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>1,294,294,500</b>	<b>1,219,112,900</b>	<b>1,141,183,688</b>	<b>93.61%</b>
I	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	314,690,000	262,040,000	237,810,640	90.75%
1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	122,430,000	122,460,000	116,788,640	<b>95.37%</b>

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	35,000,000	35,000,000	34,940,000	99.83%
3	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	24,000,000	18,950,000	18,950,000	100.00%
4	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	18,260,000	18,260,000	18,260,000	100.00%
5	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	115,000,000	67,370,000	48,872,000	72.54%
<b>II</b>	<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>	<b>570,754,000</b>	<b>485,889,000</b>	<b>441,088,750</b>	<b>90.78%</b>
6	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	40,280,000	26,500,000	26,320,000	99.32%
7	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	51,925,000	45,125,000	44,308,000	98.19%
8	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	391,573,000	327,288,000	290,891,750	88.88%
9	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	86,976,000	86,976,000	79,569,000	91.48%
<b>III</b>	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>408,850,500</b>	<b>471,183,900</b>	<b>462,284,298</b>	<b>98.11%</b>
10	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	16,000,000	19,178,300	19,178,300	100.00%
11	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	360,000,000	429,294,800	421,835,998	98.26%
12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	32,850,500	22,710,800	21,270,000	93.66%
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>636,188,000</b>	<b>613,098,000</b>	<b>589,747,500</b>	<b>96.19%</b>
<b>IV</b>	<b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan</b>	<b>90,400,000</b>	<b>50,400,000</b>	<b>49,210,000</b>	<b>97.64%</b>
13	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	90,400,000	50,400,000	49,210,000	97.64%
<b>V</b>	<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>545,788,000</b>	<b>562,698,000</b>	<b>540,537,500</b>	<b>96.06%</b>
14	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	250,205,000	261,895,000	261,895,000	100.00%
15	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	295,583,000	300,803,000	278,642,500	92.63%
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>231,896,738</b>	<b>149,388,400</b>	<b>147,966,959</b>	<b>99.05%</b>

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
<b>VI</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>231,896,738</b>	<b>149,388,400</b>	<b>147,966,959</b>	<b>99.05%</b>
16	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	79,998,300	44,912,200	44,475,725	99.03%
17	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	39,999,750	22,488,500	22,466,350	99.90%
18	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	111,898,688	81,987,700	81,024,884	98.83%
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>12,096,246,904</b>	<b>13,002,706,539</b>	<b>11,164,880,617</b>	<b>85.87%</b>
<b>VII</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>309,787,788</b>	<b>299,228,102</b>	<b>281,315,150</b>	<b>94.01%</b>
19	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65,349,675	56,044,675	55,639,400	99.28%
20	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9,120,391	9,100,655	9.098.600	99.87%
21	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2,324,425	2,324,375	2.125150	91.42%
22	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,482,450	2,482,550	2,362,850	95.18%
23	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2,664,800	2,664,800	2,561,050	96.11%
24	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18,796,047	9,851,047	8,958,150	90.94%
25	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	209,050,000	216,760,000	200,569,950	92.53%
<b>VIII</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6,832,483,273</b>	<b>7,816,306,504</b>	<b>6,691,869,556</b>	<b>85.61%</b>
26	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,830,210,648	7,814,033,879	6,690,057,956	85.62%
27	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,385,225	1,385,225	933,400	67.38%
28	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	887,400	887,400	878,200	98.96%
<b>IX</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>876,425</b>	<b>876,425</b>	<b>868,000</b>	<b>99.04%</b>
29	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	349,675	349,675	349,200	99.86%
30	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	526,750	526,750	518,800	98.49%
<b>X</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>93,796,375</b>	<b>102,364,175</b>	<b>101,482,400</b>	<b>99.14%</b>
31	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	18,446,700	23,304,500	23,206,750	99.58%
32	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	75,349,675	79,059,675	78,275,650	99.01%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
<b>XI</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>490,178,424</b>	<b>517,213,424</b>	<b>485,845,893</b>	<b>93.94%</b>
33	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,477,742	19,251,742	18,672,145	96.99%
34	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	151,072,019	151,072,019	141,286,937	93.52%
35	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3,735,200	3,735,200	3,660,000	97.99%
36	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77,480,000	77,480,000	76,612,405	98.88%
37	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	67,413,463	71,085,463	66,020,972	92.88%
38	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	75,000,000	94,589,000	94,196,700	99.59%
39	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,000,000	100,000,000	85,396,734	85.40%
<b>XII</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>1,458,559,500</b>	<b>1,685,084,200</b>	<b>1,451,184,535</b>	<b>86.12%</b>
40	Pengadaan Mebel	72,500,000	12,645,800	11,315,000	89.48%
41	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	146,250,000	220,478,900	211,796,990	96.06%
42	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,239,809,500	1,451,959,500	1,228,072,545	84.58%
<b>XIII</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1,860,051,834</b>	<b>1,745,641,850</b>	<b>1,364,399,772</b>	<b>78.16%</b>
43	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,500,000	7,500,000	7,250,000	96.67%
44	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	394,500,584	385,540,000	296,104,867	76.80%
45	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34,050,000	34,050,000	29,535,000	86.74%
46	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,424,001,250	1,318,551,850	1,031,509,905	78.23%
<b>XIV</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1,050,513,285</b>	<b>835,991,859</b>	<b>787,915,311</b>	<b>94.25%</b>
47	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	183,724,600	186,724,600	172,060,634	92.15%
48	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91,720,000	91,720,000	85,302,143	93.00%
49	Pemeliharaan Mebel	7,372,380	7,372,380	7,286,400	98.83%
50	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73,229,000	89,995,600	74,785,910	83.10%
51	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	20,000,000	20,000,000	19,748,843	98.74%
52	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	574,467,305	440,179,279	428,731,381	97.40%
53	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100,000,000	-	-	-

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
5	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>47,767,600</b>	<b>95.54%</b>
XV	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>47,767,600</b>	<b>95.54%</b>
54	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	50,000,000	50,000,000	47,767,600	<b>95.54%</b>
6	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>501,575,760</b>	<b>545,583,244</b>	<b>519,338,121</b>	<b>95.19%</b>
XVI	<b>Pengembangan Kapasitas Pembudi daya Ikan Kecil</b>	<b>256,924,160</b>	<b>256,924,160</b>	<b>245,713,530</b>	<b>95.64%</b>
55	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	100,159,250	100,159,250	96,737,580	<b>96.58%</b>
56	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	12,250,000	12,250,000	11,699,800	<b>95.51%</b>
57	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	144,514,910	144,514,910	137,276,150	<b>94.99%</b>
XVII	<b>Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>47,395,000</b>	<b>49,780,000</b>	<b>46,879,400</b>	<b>94.17%</b>
58	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	24,500,000	24,500,000	21,599,500	<b>88.16%</b>
59	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	22,895,000	25,280,000	25,279,900	<b>100.00%</b>
XVIII	<b>Pengelolaan Pembudi Daya Ikan</b>	<b>197,256,600</b>	<b>238,879,084</b>	<b>226,745,191</b>	<b>94.92%</b>
60	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25,000,000	25,000,000	23,125,000	<b>92.50%</b>
61	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	162,256,600	197,629,084	188,870,291	<b>95.57%</b>
62	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	10,000,000	16,250,000	14,749,900	<b>90.77%</b>
7	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>432,325,725</b>	<b>437,620,225</b>	<b>404,275,820</b>	<b>92.38%</b>
XIX	<b>Penerbitan Tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil</b>	<b>20,825,000</b>	<b>20,825,000</b>	<b>19,774,900</b>	<b>94.96%</b>
63	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	20,825,000	20,825,000	19,774,900	<b>94.96%</b>



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
<b>XX</b>	<b>Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil</b>	<b>75,777,500</b>	<b>81,072,000</b>	<b>78,480,890</b>	<b>96.80%</b>
64	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	75,777,500	81,072,000	78,480,890	<b>96.80%</b>
<b>XXI</b>	<b>Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota</b>	<b>335,723,225</b>	<b>335,723,225</b>	<b>306,020,030</b>	<b>91.15%</b>
65	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	240,201,075	240,201,075	213,908,680	<b>89.05%</b>
66	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	95,522,150	95,522,150	92,111,350	<b>96.43%</b>
<b>8</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>568,599,555</b>	<b>539,002,755</b>	<b>527,294,450</b>	<b>97.83%</b>
<b>XXII</b>	<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>111,015,000</b>	<b>111,015,000</b>	<b>107,815,685</b>	<b>97.12%</b>
67	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	10,000,000	10,000,000	9,766,000	<b>97.66%</b>
68	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	101,015,000	101,015,000	98,049,685	<b>97.06%</b>
<b>XXIII</b>	<b>Pengawasan Obat Hewan di tingkat pengecer</b>	<b>23,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>18,219,700</b>	<b>91.10%</b>
69	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	20,000,000	20,000,000	18,219,700	<b>91.10%</b>
70	Penindakan atas Penyimpangan penyediaan dan peredaran obat hewan	3,000,000	-	-	-
<b>XXIV</b>	<b>Pengendalian dan pengawasan Penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>434,584,555</b>	<b>407,987,755</b>	<b>401,259,065</b>	<b>98.35%</b>
71	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	434,584,555	407,987,755	401,259,065	<b>98.35%</b>
<b>9</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>518,341,000</b>	<b>763,364,500</b>	<b>711,957,344</b>	<b>93.27%</b>
<b>XXV</b>	<b>Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>138,400,000</b>	<b>128,492,000</b>	<b>125,556,003</b>	<b>97.72%</b>
72	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	115,000,000	105,092,000	102,156,003	<b>97.21%</b>
73	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	23,400,000	23,400,000	23,400,000	<b>100.00%</b>

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
<b>XXVI</b>	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>379,941,000</b>	<b>634,872,500</b>	<b>586,401,341</b>	<b>92.37%</b>
74	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	200,000,000	200,000,000	190,324,496	<b>95.16%</b>
75	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	38,060,000	38,060,000	11,800,000	<b>31.00%</b>
76	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	47,856,000	187,856,000	181,384,807	<b>96.56%</b>
77	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	94,025,000	208,956,500	202,892,038	<b>97.10%</b>
<b>10</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>602,797,400</b>	<b>583,147,000</b>	<b>501,522,719</b>	<b>86.00%</b>
<b>XXVII</b>	<b>Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/ kota</b>	<b>131,067,000</b>	<b>181,486,000</b>	<b>166,836,109</b>	<b>91.93%</b>
78	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	101,450,000	151,869,000	146,265,409	<b>96.31%</b>
79	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	29,617,000	29,617,000	20,570,700	<b>69.46%</b>
<b>XXVIII</b>	<b>Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kabupaten/kota</b>	<b>99,128,000</b>	<b>89,264,600</b>	<b>56,814,800</b>	<b>63.65%</b>
80	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	75,000,000	67,549,600	45,406,800	<b>67.22%</b>
81	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	18,528,000	11,794,000	4,748,000	<b>40.26%</b>
82	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5,600,000	9,921,000	6,660,000	<b>67.13%</b>
<b>XXIX</b>	<b>Pengelolaan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/ kota</b>	<b>129,378,400</b>	<b>129,378,400</b>	<b>124,026,360</b>	<b>95.86%</b>
83	Pengelolaan jasa laboratorium	40,000,000	40,000,000	39,670,480	<b>99.18%</b>
84	Pengelolaan jasa medik veteriner	89,378,400	89,378,400	84,355,880	<b>94.38%</b>
<b>XXX</b>	<b>Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner</b>	<b>205,799,000</b>	<b>178,018,000</b>	<b>149,865,450</b>	<b>84.19%</b>
85	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	55,270,000	50,270,000	44,606,000	<b>88.73%</b>
86	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	40,744,000	40,814,000	37,063,450	<b>90.81%</b>
87	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	960,000	960,000	960,000	<b>100.00%</b>
88	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	108,825,000	85,974,000	67,236,000	<b>78.21%</b>
<b>XXXI</b>	<b>Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan</b>	<b>37,425,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>3,980,000</b>	<b>79.60%</b>
89	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	5,000,000	5,000,000	3,980,000	<b>79.60%</b>

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
90	Penanganan atas pelanggaran kesejahteraan hewan sesuai kewenangannya	32,425,000	-	-	-
11	<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>38,000,000</b>	<b>38,000,000</b>	<b>36,297,000</b>	<b>95.52%</b>
XXXII	<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>38,000,000</b>	<b>38,000,000</b>	<b>36,297,000</b>	<b>95.52%</b>
91	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	38,000,000	38,000,000	36,297,000	95.52%
12	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>14,950,000</b>	<b>14,538,000</b>	<b>13,367,000</b>	<b>91.95%</b>
XXXIII	<b>Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>4,695,000</b>	<b>93.90%</b>
92	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	5,000,000	5,000,000	4,695,000	93.90%
XXXIV	<b>Izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan</b>	<b>9,950,000</b>	<b>9,538,000</b>	<b>8,672,000</b>	<b>90.92%</b>
93	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	3,600,000	3,394,000	3,082,000	90.81%
94	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	6,350,000	6,144,000	5,590,000	90.98%
13	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>207,035,000</b>	<b>224,801,800</b>	<b>214,989,400</b>	<b>95.64%</b>
XXXV	<b>Pelaksanaan penyuluhan pertanian</b>	<b>207,035,000</b>	<b>224,801,800</b>	<b>214,989,400</b>	<b>95.64%</b>
95	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	38,900,000	38,900,000	34,490,000	88.66%
96	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	65,650,000	75,650,000	73,114,750	96.65%
97	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	87,085,000	94,851,800	92,344,650	97.36%
98	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	15,400,000	15,400,000	15,040,000	97.66%
<b>TOTAL</b>		<b>17,192,250,582</b>	<b>18,180,363,363</b>	<b>16,020,588,218</b>	<b>88.12%</b>

Tabel 3.21 Realisasi anggaran (serapan) di bawah 80%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%	
1	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	115.000.000	67.370.000	48.872.000	72.54	Pelunasan 3 TTI mundur. mengakibatkan fasilitasi distribusi terhenti di 30 TTI (menunggu pelunasan). setelah dilunasi kondisi normal kembali. tetapi waktu sudah tidak memungkinkan terkait administrasi keuangan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi (Rp)		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	394.500.584	385.540.000	296.104.867	<b>76.80</b>	Realisasi sesuai kebutuhan perbulan (sesuai tagihan)
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.424.001.250	1.318.551.850	1.031.509.905	<b>78.23</b>	2 jabatan tidak boleh diisi karena kebijakan yang berlaku
4	Pembangunan. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	38.060.000	38.060.000	11.800.000	<b>31.00</b>	Perencanaan kurang cermat. realisasi kerusakan tidak membutuhkan biaya banyak
5	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	29.617.000	29.617.000	20.570.700	<b>69.46</b>	Vaksin rabies menggunakan produk dalam negeri nilainya jauh di bawah harga produk import
6	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	75.000.000	67.549.600	45.406.800	<b>67.22</b>	Laboratorium pengujian (ILab Propinsi) tidak dapat melakukan pemeriksaan sampel karena kehabisan bahan kimia (reagen) untuk pengujian HPLC
7	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	18.528.000	11.794.000	4.748.000	<b>40.26</b>	Hewan yang masuk ke Surakarta berkurang karena kasus PMK
8	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	5.600.000	9.921.000	6.660.000	<b>67.13</b>	Pembangunan jembatan di perbatasan. sehingga tidak bisa dilaksanakan pemeriksaan di perbatasan. pemeriksaan dilaksanakan di pasar-pasar menggunakan/ inklud anggaran dari sub kegiatan lain
9.	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan akhir tahun SKPD	1.385.225	1.385.225	933.400	<b>67.38</b>	Perencanaan kurang cermat
10	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	108.825.000	85.974.000	67.236.000	<b>78.21</b>	Pengujian sampel belum dapat dilayani oleh laboratorium pengujian karena sedang perbaikan peralatan lab. Dan kenaikan tarif pengujian
11	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	5.000.000	5.000.000	3.980.000	<b>79.60</b>	Mundurinya pelaksanaan pekerjaan terkait system penatausahaan . berakibat beberapa kegiatan dilaksanakan di lokasi dan waktu yang bersamaan sehingga pekerjaan ini terlaksana menggunakan anggaran dari sub kegiatan lain

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

LKjIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta Tahun 2022. secara umum dapat disimpulkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strateginya. Hasil analisa pencapaian indikator tujuan dan sasaran terhadap capaian kinerja (performa results) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta tahun 2022. menggambarkan capaian kinerja selama tahun 2022. menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan dalam RPJMD dan telah memenuhi 6 (enam) sasaran strategis sebagaimana yang telah ditargetkan. hal tersebut untuk mengatasi dan menjawab permasalahan / issue strategis yang ada di Dinas ketahanan pangan dan pertanian Kota Surakarta.

Tabel 4.1 Kinerja tahun 2022

No	Sasaran Strategis 2022-2026	Indikator	Capaian 2022 (%)	Nilai	Predikat
1.	Meningkatnya produktivitas keunggulan kompetitif sektor riil	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Skor PPH Ketersediaan</li> <li>– Skor PPH Konsumsi</li> </ul>	99.5	>85 =92.5	Sangat berhasil
2.	Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam berimbang dan aman	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)</li> <li>– Persentase Angka Kecukupan Protein(AKP)</li> <li>– Persentase PSAT aman</li> </ul>	105.93	>85 =92.5	Sangat berhasil
2	Meningkatnya produktivitas pertanian dan peternakan	– Produksi Pertanian	120.3	>85 =92.5	Sangat berhasil
3.	Meningkatnya Kesehatan hewan dan pangan asal hewan yang layak konsumsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Angka Status Kesehatan Hewan</li> <li>– Rasio PPAH layak konsumsi</li> </ul>	111.35	>85 =92.5	Sangat berhasil
4.	Meningkatnya produksi perikanan tangkap. perikanan budidaya dan olahan ikan	Produksi ikan	102	>85 =92.5	Sangat berhasil
5.	Meningkatnya kualitas dan keefektifan perencanaan agar efektif dan efisien	Nilai PMPRB	100.4	>85 =92.5	Sangat berhasil

## B. Strategi Peningkatan Kinerja ke depan

Perubahan perubahan begitu cepat dan kompleks. membuat organisasi publik yang dalam segala bentuk kegiatannya didedikasikan bagi kepentingan masyarakat. perlu menyesuaikan perubahan dan **responsif** terhadap kepentingan masyarakat. untuk tsb maka ke depan dalam rencana-rencana kegiatan harus disusun secara **strategis dan berkelanjutan** melalui pemanfaatan seluruh kekuatan. supaya berbagai peluang dapat diraih sehingga mandat dan misi keberadaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. dapat dilaksanakan sejalan dengan aturan aturan yang ada.

Adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal dan eksternal menjadi salah satu faktor pendukung untuk keberhasilan capaian kinerja di tahun tahun mendatang. Terhadap target capaian yang telah terpenuhi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian akan mengambil langkah konstruktif dan konkrit agar kendala yang mungkin akan dihadapi dan resiko kegagalan di tahun mendatang dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin.

Pencapaian target sasaran strategis melalui IKU Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surakarta didukung adanya alokasi anggaran belanja dalam **Perubahan APBD Kota Surakarta tahun 2022. sebesar Rp 18.180.363.363.00 direalisasikan sebesar Rp 16.020.588.218.00 dengan serapan 88.12%.**

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dispangtan Kota Surakarta Tahun 2022. Secara garis besar disusun dalam rangka untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah Dispangtan Kota Surakarta di masa mendatang.

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
DAN PERTANIAN  
KOTA SURAKARTA**

**Ir. EKO NUGROHO ISBANDIJARSO, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680223 199208 1002**



**Menguatkan Pangan  
Mewujudkan Kesejahteraan  
Dispangtan BERAKHLAK**



